



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis, 17 Juli 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Dewan Konsultasikan Hasil Paripurna ke Gubernur Jawa Timur

DPRD Sidoarjo akan segera menindaklanjuti Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditolak mayoritas fraksi. Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih menjelaskan, hingga kini belum ada keputusan final soal tindak lanjut setelah raperda ditolak.

Nasih mengungkapkan, konsultasi menjadi langkah penting sebelum menentukan apakah pertanggungjawaban tersebut akan dilanjutkan melalui peraturan kepala daerah (Perkada) atau mekanisme lainnya.

"Kami masih akan lanjutkan konsultasi ke gubernur sampai Kemendagri, bagaimana seharusnya proses lanjutan ini dilakukan," katanya. Termasuk apakah akan berdampak pada tahapan anggaran selanjutnya seperti PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).

Nasih mengungkapkan, berdasarkan ketentuan, apabila DPRD tidak menyetujui raperda tersebut, maka dalam waktu maksimal tujuh hari, pemerintah daerah harus mengajukan usulan pertanggungjawaban

melalui Perkada kepada gubernur. Jika dalam waktu 15 hari tidak ada keputusan dari gubernur, maka perkada akan berlaku otomatis.

Menurutnya, langkah menuju Perkada bukan berarti tanpa konsekuensi. Meski tidak mengganggu APBD 2025 atau 2026, penolakan raperda tetap akan memberi catatan tersendiri dalam evaluasi. "Plus minusnya lebih ke aspek evaluatif saja, dan bagaimana keputusan akhir nanti ada di tangan gubernur," ungkapnya. (eza/uzi)

DPRD Tolak Pertanggungjawaban Bupati Subandi Terkait APBD 2024

Dimilai Tidak Penuhi Target RPJMD



Target pendapatan belanja 2024 sebesar Rp 1,236 triliun, turun 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,302 triliun."

ANANG SISWANDOKO
Juru Bicara Fraksi Gerindra

SIDOARJO - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 menuai penolakan dari mayoritas fraksi di DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna kemarin (16/7). Ada sejumlah alasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024 ditolak. Di antaranya, ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, hingga rendahnya transparansi penggunaan anggaran operasional kepala daerah.

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Ditolak

- Mayoritas fraksi DPRD Sidoarjo menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
- Fraksi Gerindra menuding adanya pemotongan target pendapatan dan belanja daerah.
- Dana operasional kepala daerah dinilai tidak transparan penggunaannya.
- PAN menyoroti masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
- Penolakan ini disebut Ketua DPRD dan Bupati sebagai bahan evaluasi ke depan.

Sumber: Paripurna DPRD Sidoarjo



KOMPAS MENOLAK: Juru Bicara Fraksi PAN Roki Wardoyo (kiri) menyerahkan dokumen pandangan fraksi kepada Bupati Sidoarjo Subandi (kanan) saat sidang Paripurna di gedung DPRD Sidoarjo kemarin (16/7). Fraksi PAN salah satu yang menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.

PDP dan PKB Menyetujui

Adapun dua fraksi yang menyetujui raperda secara penuh adalah Fraksi PDIP dan Fraksi PKB. Sehingga, komposisi fraksi lebih banyak menolak daripada menyetujui raperda pertanggungjawaban APBD 2024.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih mengatakan, penolakan itu mungkin adalah

sentilan dari DPRD sekaligus rasa sayang dari DPRD. Terlebih agar ke depan pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif harus lebih baik dan serius. "Ending-nya seperti ini. Kami terima sama-sama. Ini bagian dari proses di Sidoarjo. Ke depan diharapkan bisa belajar banyak," katanya.

Disisi lain, Bupati Sidoarjo

Hasil keputusan itu akan menjadi evaluasi di tahun ini dan ke depan."

SUBANDI
Bupati Sidoarjo

Subandi mengatakan hasil itu akan jadi evaluasi. "Hasil keputusan itu akan menjadi evaluasi di tahun ini dan ke depan. Semuanya sudah seperti apa di rapat tadi," ujarnya singkat. (eza/uzi)

Ketua KONI Sidoarjo bebankan torehan prestasi atlet ketika berkunjung ke Unitomo.

Atlet Berprestasi Dapat Beasiswa dari KONI

Sidoarjo, Memorandum

KONI Sidoarjo berencana memberikan beasiswa untuk atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah di kancah regional, nasional maupun internasional.

Untuk merealisasikan rencana pemberian beasiswa itu, pengurus KONI Sidoarjo berkunjung ke Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Kunjungan itu bertujuan untuk melakukan peninjauan kerja sama beasiswa.

Dipimpin Ketua Umum KONI Sidoarjo Imam Mukri Affandi, rombongan disambut Rektor Unitomo Prof Dr Siti Marwiyah didampingi Wakil Rektor 1, 2 dan 3 di Ruang Proklamasi Unitomo, Selasa (15/7). Imam Mukri Affandi mengatakan, rencana pemberian beasiswa jadi bentuk penghargaan kepada atlet. "Selain itu untuk menjaga motivasi atlet Sidoarjo agar terus berprestasi," katanya.

Ia berharap langkah seperti ini dapat juga menjadi semangat atlet untuk meningkatkan prestasi olahraga. "Ini menjadi salah satu langkah inovatif dan visioner dari KONI Sidoarjo karena kami melihat prestasi olahraga yang berhasil ditunjukkan atlet Sidoarjo pasti ada masanya," ujarnya.

Imam Mukri mengatakan dukungan finansial lewat pemberian beasiswa sangatlah penting bagi masa depan atlet. Mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya. Oleh karenanya KONI Sidoarjo akan berupaya mewujudkan akses pendidikan dengan biaya yang ringan kepada mereka.

"Bidang data KONI Sidoarjo akan kami perintahkan untuk segera menginventarisir data-data atlet yang berprestasi selama ini. Termasuk saat mengikuti Porprov Jatim IX 2025 kemarin," ujarnya.

Rektor Unitomo Surabaya Prof Dr Siti Marwiyah menyambut baik langkah ini. "Ini langkah yang sangat bagus, semoga rencana ini akan segera direalisasikan bersama. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi para atlet," katanya. (sud/san/epe)

U-17 Menang Derby, Lolos 32 Besar Piala Soeratin

KOTA-Deltras Sidoarjo U-17 memenangi laga penentuan melawan Persida U-17 dalam lanjutan Grup J Piala Soeratin U-17 Kapal Api Asprov PSSI Jatim 2025. Bermain di Stadion Jenggolo, Selasa (15/7), The Young Lobster unggul tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan dicetak Muhammad Andika Putra Pratama lewat sundulan di menit ke-89. Dia menyambut umpan tarik dari Aqil Agustian Pratama yang menyisir sisi kanan.

Dukungan penuh supporter menjadi suntikan semangat bagi skuad asuhan Rendi Irwan. Mereka akhirnya finis sebagai juara grup dengan torehan sembilan poin dari empat laga.

Kemenangan tersebut membawa Deltras U-17 lolos ke babak 32 Besar bersama Akor FC Jombang U-17. Akor FC menang 3-1 atas Aresk Simo Putra U-17 di laga terakhir grup.

Akor FC juga mengoleksi sembilan poin, namun kalah head to head dari Del-



LOLOS: Pemain Deltras Sidoarjo U-17 saat merayakan kemenangan.

tr. Sebelumnya, mereka takluk 0-1 saat jumpa Deltras di laga kedua.

Persida U-17 yang hanya butuh hasil imbang justru tampil antikomik. Padahal di dua laga awal, mereka selalu menang telak 4-0 atas Aresk Simo Putra U-17 dan Suryanaga

Connection U-17. Dengan hasil ini, Deltras dan Akor FC menuju ke fase gugur. Sementara Persida, Aresk Simo Putra dan Suryanaga Connection harus tersingkir.

Grup J sendiri dihuni lima tim dalam format penyisihan yang mema-

kai sistem setengah kompetisi. Piala Soeratin U-17 Jatim 2025 diikuti 70 tim dari berbagai daerah.

Juara dan runner up grup menuju ke babak 32 Besar, akan bergulung dengan sistem gugur hingga final. (sai/vga)

Susun Panduan Pengembangan Wisata hingga 2045

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kemudaraan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tengah menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPAR-DA) untuk periode 2025-2045. Dokumen ini disiapkan sebagai pedoman strategis jangka panjang guna mewujudkan pembangunan sektor pariwisata yang terarah, komprehensif, dan berkelanjutan.

Paparan awal RIPAR-DA disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pada Senin (14/7) di Ruang Rapat Delta Wicaksana, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dihadiri oleh Sek-



KOORDINASI: Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih (tengah) dalam rapat koordinasi lintas sektor.

retaris Daerah, Ketua Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, dalam arahannya menekankan bahwa pengembangan pariwisata daerah harus

tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga menggali dan mengoptimalkan potensi lokal. "Integrasi lintas sektor untuk memperkuat po-

tensi wisata edukasi, budaya, dan kesehatan juga sangat penting," ujarnya.

Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Sidoarjo, Vira Murti Krida Laksmi, menjelaskan bahwa penyusunan RIPAR-DA ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mencakup beragam tema pengembangan, mulai dari wisata urban, religi, industri, hingga ekonomi kreatif.

"Strategi yang diterapkan juga mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, seperti Banyuwangi, yang berhasil menyinergikan seluruh perangkat daerah dalam satu visi kepariwisataan," ucapnya.

Ke Halaman 10

DPRD Tolak Pertanggungjawaban Bupati Subandi Terkait APBD 2024

Dinilai Tidak Penuhi Target RPJMD

SIDOARJO - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 menuai penolakan dari mayoritas fraksi di DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna kemarin (16/7). Ada sejumlah alasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024 ditolak. Di antaranya, ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, hingga rendahnya transparansi penggunaan anggaran operasional kepala daerah.

Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang paling vokal menyuarakan penolakan. Melalui juru bicaranya, Anang Siswandoko, Fraksi Gerindra menyebutkan, pihaknya menolak raperda dengan berat hati. Alasannya, adalah ketidaksesuaian antara realisasi pendapatan dan belanja daerah dengan target RPJMD.

"Target pendapatan belanja tahun 2024 sebesar Rp 1,236 triliun, turun 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,302 triliun," katanya.

Menurutnya, ini menjadi indikator bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam menggenjot pendapatan asli



Target pendapatan belanja 2024 sebesar Rp 1,236 triliun, turun 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,302 triliun."

ANANG SISWANDOKO
Juru Bicara Fraksi Gerindra

daerah (PAD), terutama dari sektor pajak. Anang juga menyoroti transparansi penggunaan biaya penunjang operasional kepala daerah.

Penolakan juga datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Juru bicara fraksi Roki Wardoyo menyoroti masih buruknya kondisi sejumlah sekolah di Sidoarjo. Menurutnya, kondisi itu seolah menjadi siklus tahunan yang tidak kunjung terselesaikan, meski pemerintah daerah mengklaim telah memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan.

"Fraksi PAN dengan tegas menolak raperda ini," katanya. Fraksi Golkar, Fraksi PKS-PPP, juga menolak. Fraksi Nasdem-Demokrat terbelah. Nasdem menolak sedangkan Demokrat menerima.



KOMPAK MENOLAK: Juru Bicara Fraksi PAN Roki Wardoyo (kiri) menyerahkan dokumen pandangan fraksi kepada Bupati Sidoarjo Subandi (kanan) saat sidang Paripurna di gedung DPRD Sidoarjo kemarin (16/7). Fraksi PAN salah satu yang menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.

PDIP dan PKB Menyetujui

Adapun dua fraksi yang menyetujui raperda secara penuh adalah Fraksi PDIP dan Fraksi PKB. Sehingga, komposisi fraksi lebih banyak menolak daripada menyetujui raperda pertanggungjawaban APBD 2024. Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih mengatakan, penolakan itu mungkin adalah

sentilan dari DPRD sekaligus rasa sayang dari DPRD. Terlebih agar ke depan pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif harus lebih baik dan serius.

"Ending-nya seperti ini. Kami terima sama sama. Ini bagian dari proses di Sidoarjo. Ke depan harapannya bisa belajar banyak," katanya.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo

Hasil keputusan itu akan menjadi evaluasi di tahun ini dan ke depan."

SUBANDI
Bupati Sidoarjo

Subandi mengatakan hasil itu akan jadi evaluasi. "Hasil keputusan itu akan menjadi evaluasi di tahun ini dan ke depan. Semuanya sudah seperti apa di rapat tadi," ujarnya singkat. (eza/uzi)

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Ditolak

- Mayoritas fraksi DPRD Sidoarjo menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
- Fraksi Gerindra menuding adanya permainan target pendapatan dan belanja daerah.

Sumber: Paripurna DPRD Sidoarjo



- Dana operasional kepala daerah dinilai tidak transparan penggunaannya.
- PAN menyoroti masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
- Penolakan ini disebut Ketua DPRD dan Bupati sebagai bahan evaluasi ke depan.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dewan Konsultasikan Hasil Paripurna ke Gubernur Jawa Timur

DPRD Sidoarjo akan segera menindaklanjuti Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditolak mayoritas fraksi. Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menjelaskan, hingga kini belum ada keputusan final soal tindak lanjut setelah raperda ditolak.

Nasih mengungkapkan, konsultasi menjadi langkah penting sebelum menentukan apakah pertanggungjawaban tersebut akan dilanjutkan melalui peraturan kepala daerah (Perkada) atau mekanisme lainnya.

"Kami masih akan lanjutkan konsultasi ke gubernur sampai Kemendagri, bagaimana seharusnya proses lanjutan ini dilakukan," katanya. Termasuk apakah akan berdampak pada tahapan anggaran selanjutnya seperti PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).

Nasih mengungkapkan, berdasarkan ketentuan, apabila DPRD tidak menyetujui raperda tersebut, maka dalam waktu maksimal tujuh hari, pemerintah daerah harus mengajukan usulan pertanggungjawaban

melalui Perkada kepada gubernur. Jika dalam waktu 15 hari tidak ada keputusan dari gubernur, maka perkada akan berlaku otomatis.

Menurutnya, langkah menuju Perkada bukan berarti tanpa konsekuensi. Meski tidak mengganggu APBD 2025 atau 2026, penolakan raperda tetap akan memberi catatan tersendiri dalam evaluasi. "Plus minusnya lebih ke aspek evaluatif saja, dan bagaimana keputusan akhir nanti ada di tangan gubernur," ungkapnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



TUNAI:
Isnaini
(kanan),
kader
kesehatan
Kelurahan
Sidoklumpuk,
mencairkan
BSU
di Kantor
Pos Sidoarjo
kemarin
(16/7).
BSU
diberikan
bagi pekerja
dengan upah
di bawah
Rp 3,5 juta.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

145 Ribu Warga Sidoarjo Terima Bantuan Subsidi Upah

Alokasi Anggaran Capai Rp 111 Miliar

SIDOARJO - Sebanyak 145 ribu lebih warga Sidoarjo akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Kemarin (16/7), penyaluran mulai dilakukan lewat Kantor Pos Sidoarjo. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, pemberian BSU ditujukan kepada warga dengan upah di bawah Rp 3,5 juta. "Kami secara simbolis hari ini (kemarin,

Red) memberikan ke kader kesehatan posyandu, masing-masing mendapat BSU Rp 600 ribu," katanya pasca penyerahan kemarin (16/7).

Dana yang digelontorkan untuk BSU wilayah Sidoarjo mencapai Rp 111 miliar. Fenny mengatakan, BSU dilakukan melalui dua mekanisme. Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank milik negara, pencairan di-

lakukan melalui Kantor Pos.

"Ada 77.988 orang yang pencairannya dilakukan di kantor pos," ujarnya. Total mencapai 46,7 miliar. Sementara itu, sisanya akan menerima dana melalui bank milik negara. "Kami menyarankan agar BSU ini bisa mendukung ketahanan pangan keluarga masing-masing, atau dibuat usaha agar uangnya berputar," katanya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

S I D O A R J O DALAM ANGKA

JUMLAH SAMPAH DARI TPS 3R KE TPA GRIYO MULYO JABON

■ Januari:	10.817 ton
■ Februari:	9.682 ton
■ Maret:	10.339 ton
■ April:	9.822 ton
■ Mei:	10.239 ton
■ Juni:	9.427 ton



GRAFIS: HERLAMBAH/JAWA POS

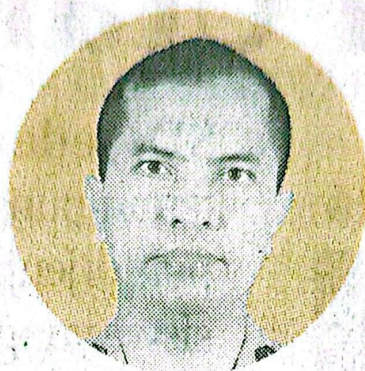
TIAP bulan, jumlah sampah yang dikirim dari tempat pengolahan sampah *reduce reuse recycle* (TPS 3R) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon tercatat fluktuatif. Total sampah yang masuk mencapai 60 ribu ton dalam enam bulan terakhir. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Isi MPLS dengan Edukasi Tertib Berlalu Lintas



Tidak hanya Satlantas, Satbinmas juga dilibatkan. Hari ini (kemarin, Red) misalnya, personel mengisi program MPLS di SMKN 1 Sidoarjo. Mengedukasi siswa terkait tata tertib berlalu lintas. Bagian dari upaya preventif pelaksanaan operasi.”

IPTU TRI NOVI HANDONO

Kasihumas Polresta Sidoarjo berbicara terkait upaya Polresta untuk menyukseskan Operasi Patuh Semeru 2025

Jawa Pos

KILAS DELTA



AHMAD REZA/JAWA POS

WISATA LOKAL: Warga menaiki wahana kereta di wisata Punden Mbah Retjo di Desa Ganggangpanjang, Tanggulangin, beberapa waktu lalu. Pengembangan pariwisata Sidoarjo harus menggali kekuatan lokal.

Pemkab Susun Pengembangan Wisata hingga 2045

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo tengah menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (Riparda) untuk jangka waktu 2025 hingga 2045. Dokumen ini diproyeksikan menjadi panduan utama dalam pembangunan sektor pariwisata.

Kabid Pariwisata Disporapar Sidoarjo Vira Murti Krida Laksmi menjelaskan, Riparda akan selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. "Dokumen tersebut memuat arah pembangunan wisata urban, religi, industri, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif," ujarnya kemarin (16/7).

Menurutnya, ini juga diharapkan bisa mencontoh praktik terbaik dari daerah lain, seperti Banyuwangi, yang sukses mendorong sinergi lintas perangkat daerah dalam membangun sektor pariwisata.

Sementara itu, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menginginkan pengembangan pariwisata Sidoarjo harus menggali kekuatan lokal dan tidak sekadar meniru tren global. "Perlu integrasi antar sektor untuk memperkuat potensi wisata edukasi, budaya, hingga kesehatan," ujarnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kampanye Anak tanpa Gawai di Hari Anak Nasional

JAKARTA - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2025 nanti bakal dirayakan dengan pendekatan berbeda. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan berbagai insentif menarik untuk anak-anak. Mulai dari tarif transportasi umum, makan di restoran, hingga masuk tempat wisata.

"Beberapa usulan kami kepada pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional adalah diupayakan transportasi umum gratis untuk anak-

anak sekolah pada tanggal 23 Juli. Syukur-syukur bisa seminggu atau seterusnya," ujar Arifah dalam konferensi pers Peringatan HAN di Kantor Kementerian PPPA di Jakarta, Rabu (16/7).

Tak hanya itu, Arifah juga mendorong, agar pemda memberikan tiket masuk gratis atau tarif khusus bagi anak-anak yang datang ke destinasi wisata tanpa membawa gawai. Langkah ini sebagai upaya mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai.

Usulan tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemda setempat telah

USULAN INSENTIF PADA HAN 2025

- Transportasi umum gratis untuk anak sekolah pada 23 Juli
- Tiket masuk gratis ke destinasi wisata jika tanpa membawa gawai
- Harga spesial di restoran buat anak jika datang dengan keluarga dan tanpa gawai

GRATIS: BERILAHANG JAWA POS



TEMA ANAK HEBAT: Arifah Fauzi (kiri) bersama Wamen PPPA Veronica Tan menjelaskan rencana rangkaian perayaan HAN 2025 di Jakarta kemarin (16/7).

restoran untuk turut berpartisipasi dalam perayaan HAN ini. "Usulan ketiga adalah kepada rumah makan atau restoran tertentu agar memberikan harga spesial. Dengan syarat anak datang bersama keluarga dan tanpa gawai," sambungnya.

Anak tanpa gawai ini cukup

ditekankan olehnya. Sebab, menurut Arifah, ancaman gawai kian mengerikan. Ditemukan adanya korelasi antara kecanduan penggunaan gawai dengan kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan. Dari beberapa kasus yang ditemuinya, kekerasan yang dilakukan

anak-anak rata-rata karena menonton adegan serupa dari gawai yang dimiliki. Kondisi ini pun selaras dengan hasil cek kesehatan gratis (CKG). Menurutinya, di poli mata, hampir semua peserta CKG mengalami masalah dalam penglihatannya. Hal ini lantaran mereka bermain handphone lebih dari 7 jam sehari.

Kemudian, laporan sejumlah guru di jenjang PAUD tentang banyaknya balita yang mengalami *speech delay* atau telat bicara juga dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan CKG di poli anak. (mia/bas)

Di beberapa negara sudah membatasi penggunaan gadget ini. Kita sedang proses, mudah-mudahan bisa segera keluar aturannya karena dampaknya (negatif, red) luar biasa."

ARIFAH FAUZI Menteri PPPA

Jawa Pos

Kecewa, Peserta Seleksi Perangkat di Kemantren Minta Tes Ulang

SIDOARJO - Tragedi OTT Dua Kades aktif di Tulangan dan mantan Kades yang tersangjut dugaan jual beli jabatan beberapa waktu lalu menyisahkan cerita. Pasalnya, beberapa peserta seleksi perangkat desa salah satunya di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan menyampaikan kekecewaannya atas hasil tes yang dinilai tidak transparan dan memunculkan banyak tanda tanya.

Salah satu Peserta yang merasa kecewa, MTF merasa dirugikan setelah hasil akhir seleksi berbeda dengan data awal yang ia peroleh saat live score diumumkan.

"Yang membuat saya kecewa, awalnya saat live score saya unggul. Tapi saat pengumuman Berita Acara (BA), nilai saya justru tertinggal dari peserta lain. Padahal saya sempat diberi ucapan selamat atas capaian tersebut dan saya merasa di Prank," ujar MTF.

Ia menegaskan bahwa kekecewaannya bukan semata karena tidak lolos, melainkan karena proses yang dianggap tidak fair dan cenderung tertutup.

"Saya merasa kurang puas bukan karena saya kalah lalu tidak terima, tapi karena yang awalnya dinyatakan lolos, tiba-tiba saat keluar BA menjadi tidak lolos. Panitia penjurian di desa pun tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana sistem penilaiannya. Tidak lama setelah pengumuman itu, malah muncul insiden OTT terkait jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Tulangan. Hal ini makin menguatkan kecurigaan saya," jelasnya.

"Saya dan teman-teman awalnya yakin proses ini bersih. Tapi setelah melihat kenyataan adanya OTT yang sudah dirilis Polresta Sidoarjo, kami merasa kecewa. Kami sudah keluar uang untuk pendaftaran, mengurus berbagai surat penting, bahkan sampai izin kerja. Waktu dan tenaga kami pun terbuang sia-sia," keluhnya.

MTF pun menyampaikan harapan dan saran atas kejadian ini, di antaranya Pembatalan dan pencabutan hasil tes perangkat desa di 10 desa se-Kecamatan Tulangan. Dan Pelaksanaan tes ulang terhadap seluruh peserta secara terbuka dan adil.

"Saya berharap ke depan tidak ada lagi praktik jual beli jabatan. Proses seleksi harus bersih dari KKN. Tes ulang sangat penting agar hasilnya bisa benar-benar



LOETFI/DUTA

Beberapa Calon peserta seleksi perangkat Desa yang kecewa saat mengeluhkan ke wartawan

fair dan mengembalikan marwah yang telah tercoreng akibat ulah oknum. Ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tulangan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara umum," pungkasnya.

Senada Febry, mengatakan, saya kecewa banget. Tes belum selesai, tapi panitia sudah tahu siapa yang bakal jadi. Bahkan sempat menyampaikan ucapan selamat pada salah satu peserta perempuan yang katanya nilainya tinggi.

Ia juga menambahkan, "Perasaan saya waktu itu jengkel. Tes masih berlangsung, tapi panitia seolah sudah tahu siapa pemenangnya. Saya berharap ada pengulangan tes, karena saya merasa tidak ada kejujuran dalam seleksi kali ini," ungkapnya Febry kepada Duta Masyarakat (duta.co) Rabu (16/7/25).

Lebih lanjut, Febry berharap proses seleksi perangkat desa ke depan lebih transparan dan adil.

"Semoga ke depan seleksi benar-benar bersih. Jangan sampai terulang dan muncul istilah-istilah seperti NPWP, 'nomor piro wani piro'," pungkasnya.

Kades Kemantren Tegaskan Tes Perangkat Desa Sudah Sesuai Prosedur

Sementara itu, Kepala Desa Kemantren, H. Kuswandi, SH., MM dikonfirmasi wartawan, menegaskan bahwa seluruh proses penjurian perangkat desa di wilayahnya sudah dilakukan sesuai prosedur dan standar dari BKD Kabupaten Sidoarjo.

"Terima kasih, kami dari Pemerintah Desa Kemantren sudah melaksanakan proses penjurian sesuai SOP dan panduan tes dari

BKD. Jika ada kabar bahwa salah satu calon katanya lolos karena mendapat ucapan selamat, itu terjadi saat masih melihat hasil sementara dari komputer," jelasnya.

Menurut Kuswandi, hasil awal yang terlihat bukan hasil akhir. Masih ada tes lanjutan terkait kompetensi pemerintahan desa yang menjadi bagian dari penilaian utama.

"Tes belum selesai saat itu. Ucapan selamat yang sempat disampaikan bukan keputusan resmi. Setelah semuanya tuntas, panitia mengumumkan secara resmi hasil tes dari BKD sesuai urutan nilai yang sah," tegasnya.

Ia juga membantah adanya permainan atau praktik curang. "OTT yang terjadi sebelumnya itu terjadi sebelum pelaksanaan tes. Dan tahun ini, khususnya di Desa Kemantren, seleksi murni. Jadi kalau sampai ada permintaan revisi atau tes ulang, saya kurang setuju. Kasihan peserta yang sudah lolos dengan murni," ungkap Kuswandi.

Terkait pelantikan, Kuswandi menyampaikan akan mengacu pada hasil akhir dari BKD. "Kita rekomendasikan yang urutan pertama ke kecamatan, dan selanjutnya diajukan ke Bupati untuk pelantikan. Kalau ada yang gugur, otomatis cadangan naik.

Kuswandi berharap ke depan tes bisa langsung di bawah kendali BKN agar lebih obyektif. "Kalau bisa ke depan langsung di BKN, agar benar-benar murni dan tidak mudah diintervensi. Kepada peserta yang belum lolos, saya harap legowo. Masih ada kesempatan di tahun-tahun mendatang," pungkas Kepala Desa Kemantren. • Loe

Puskesmas Gedangan Sosialisasi Pemeriksaan Gratis ke Perwakilan Sekolah

SIDOARJO - Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa sekolah akan mulai dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru ini. Sebagai langkah awal, Puskesmas Gedangan menggelar kegiatan sosialisasi program tersebut, Rabu (16/7/25), bertempat di aula Puskesmas.

Untuk diketahui, CKG adalah program pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,

untuk itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes mengimbau agar Puskesmas berkolaborasi dengan lintas sektor dalam hal ini adalah dinas pendidikan agar bisa menyelesaikan target PKG anak sekolah.

Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 39 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Gedangan, terdiri dari: 16 SD, 2 SLB, 6 MI, 8 SMP/MTs, dan 7 SMA/SMK/MAN.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes melalui Kepala Puskesmas Gedangan, dr. B. Irawaty Ratna K, MM yang akrab disapa dr. Ira kepada duta.co Rabu (16/7/25)

mengatakan bahwa pelaksanaan PKG membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, terutama dari satuan pendidikan.

“Program ini butuh koordinasi dan kolaborasi aktif dari pihak sekolah. Inilah yang menjadi dasar diadakannya kegiatan sosialisasi hari ini. Harapannya, sekolah-sekolah bisa siap ber-

sama puskesmas dalam menjalankan pemeriksaan kesehatan ini secara menyeluruh bagi siswa,” ujarnya.

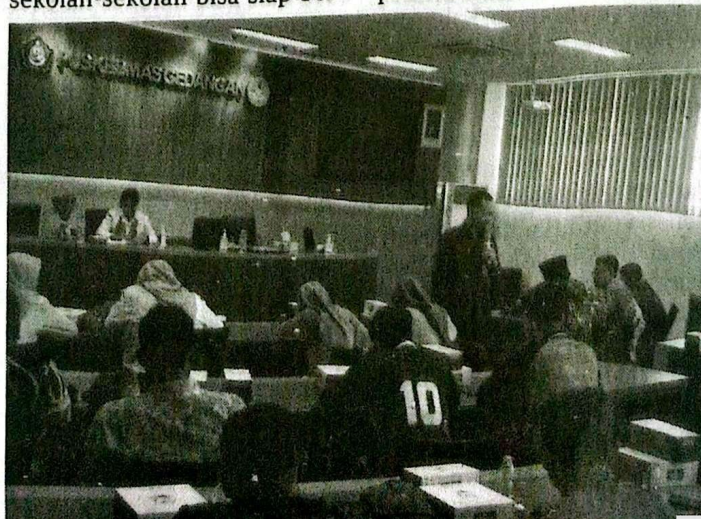
Masih lanjut dr. Ira, PKG adalah kegiatan skrining, pastinya jika ada hasil yang perlu ditindak lanjuti maka melalui sekolah akan kami sampaikan nama-nama siswa/siswi yang perlu di rujuk, agar bisa disampaikan kepada orang tua murid agar mendapat penanganan lebih lanjut.

“Harapan kedepan dengan PKG bisa sedini mungkin kita menemukan dan pencegahan penyakit, terutama penyakit tidak menular pada anak-anak tunas bangsa sebagai generasi muda kita bisa tumbuh sehat, kuat menjadi generasi hebat anak bangsa,” pungkas dr. Ira.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Ng. Tirto Adi MP, M.Pd yang hadir sebagai narasumber menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesehatan pelajar sebagai bagian dari program prioritas nasional.

“Kesehatan siswa adalah bagian dari Nawacita, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Maka dari itu, kami harapkan sekolah benar-benar siap bersinergi dengan puskesmas untuk menyelesaikan pelaksanaan PKG ini,” terang dr. Tirto.

Sosialisasi ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para guru, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis pelaksanaan PKG oleh petugas puskesmas kepada peserta sekolah. ● Loe





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Masuk Sekolah? Jangan Lupa #Cari_Aman Saat Bonceng Anak!

SIDOARJO - Memasuki tahun ajaran baru, aktivitas antar-jemput anak ke sekolah kembali menjadi rutinitas harian bagi para orang tua. Tak sedikit yang menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi praktis. Namun, penting untuk diingat: keselamatan adalah hal utama, terutama saat membonceng anak.

PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim), distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT, mengajak seluruh orang tua untuk membudayakan #Cari_Aman saat berkendara bersama anak. Edukasi keselamatan ini bukan hanya untuk pelajar, tetapi juga dimulai dari perhatian orang tua saat berkendara.

Berikut tips #Cari_Aman saat bonceng anak ke sekolah.

1. Helm SNI Wajib untuk Anak dan Pengendara

Pastikan anak memakai helm khusus anak berstandar SNI, yang pas di kepala dan nyaman digunakan.

2. Gunakan Jaket dan Sepatu Tertutup

Lengkapi anak dengan pakaian yang aman untuk berkendara, bu-



DOK/DUTA

PRAKTIS : Sepeda motor salah satu transportasi praktis buat mengantar anak ke sekolah.

kan hanya untuk melindungi dari cuaca tapi juga risiko cedera.

3. Duduk Menghadap Depan dan Pegang Erat

Posisi duduk anak harus menghadap ke depan, bukan menyamping

atau berdiri. Ajak anak memeluk pengendara agar tetap seimbang.

4. Jangan Membawa Barang Berlebih

Hindari membawa tas besar atau barang tambahan yang dapat

mengganggu kestabilan motor atau posisi anak.

5. Berkendara dengan Halus dan Waspada

Hindari manuver tajam dan jaga kecepatan stabil, terutama di

sekitar area sekolah.

Momen Istimewa: Hari Anak Nasional

Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli menjadi pengingat bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatan, termasuk saat berkendara. Dengan membonceng secara aman dan nyaman, orang tua telah memberikan contoh positif dan menjaga hak dasar anak: hak untuk merasa aman di mana pun mereka berada.

"Keselamatan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi dimulai dari rumah - termasuk saat orang tua mengantar mereka dengan sepeda motor. #Cari_Aman saat bonceng anak adalah bentuk kasih sayang nyata," ujar Suhari, Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim.

MPM Honda Jatim secara aktif menggelar program edukasi keselamatan ke sekolah dan komunitas melalui kegiatan Safety Riding Goes to School dan pelatihan menggunakan Honda Riding Trainer (HRT) yang juga bisa dimanfaatkan oleh siswa dan orang tua. ● **Imm**

DUTA



Pengendara motor yang terjaring razia Operasi Patuh Semeru di Sidoarjo.

Banyak Pemotor Terjaring Operasi Patuh Semeru

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Meski sudah sering diimbau dan diberi edukasi, masih banyak pengendara motor di Sidoarjo yang nekat melanggar aturan lalu lintas. Buktinya, puluhan pemotor terjaring razia dalam Operasi Patuh Semeru 2025 yang digelar di Bundaran Taman Pinang Indah (TPI) dan sejumlah titik lain di wilayah Sidoarjo, Rabu (16/7/2025) pagi.

Razia ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan Satlantas Polresta Sidoarjo selama pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2025. Penindakan difokuskan pada pelanggaran kasat mata yang tidak terjangkau oleh sistem tilang elektronik atau ETLE.

“Kami berhasil menilang sekitar ratusan kendaraan pada hari ketiga ini. Kami harap masyarakat sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas,” ujar Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo, AKP Ali Rifqi Mubarak, saat di lokasi razia, Rabu (16/7/2025).

Ali menjelaskan, pelanggaran yang dominan ditemukan adalah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, berboncengan lebih dari satu orang, kendaraan tanpa spion, menggunakan knalpot brong, hingga motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

“Pengendara motor memang masih mendominasi sebagai pelanggar. Karena itu kami optimalkan penindakan kasat mata yang tidak bisa ditindak melalui ETLE,” kata Ali.

Ia menambahkan, sejak hari pertama hingga hari ketiga Operasi Patuh Semeru 2025, sudah ada ratusan pelanggar yang ditindak. Operasi ini menyasar pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

“Hari ketiga Operasi Patuh Semeru ini masih banyak terutama pengendara sepeda yang masih bandel tidak menggunakan helm, dan berboncengan tiga. Mereka kami berikan sanksi tilang,” imbuh Ali

Sementara itu, beberapa pengendara mengaku tidak mengetahui adanya operasi. Huda (31), salah satu pengendara yang terjaring razia, mengatakan dirinya baru pertama kali melewati bundaran TPI dan tidak mengetahui ada razia. “Saya tidak tahu ada razia di sini. Biasanya saya lewat jalan lain,” ujar Huda. (md/rus)



Polisi mengedukasi tertib lalin dan bijak bermedsos di SMPN 1 Sukodono.

Polisi Sidoarjo Edukasi Siswa Bijak Bermedsos

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Kapolsek Sukodono Polresta Sidoarjo AKP Saadun memberikan penyuluhan penting kepada para pelajar baru SMPN 1 Sukodono, Rabu 16 Juli 2025.

Kegiatan ini difokuskan pada edukasi tentang tertib berlalulintas serta bijak dalam menggunakan media sosial.

AKP Saadun menekankan pentingnya kedisiplinan sejak usia dini dalam berlalulintas.

Ia mengingatkan para pelajar agar tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah jika belum memiliki SIM, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

“Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Adik-adik harus tahu bahwa berkendara tanpa SIM itu melanggar hukum dan sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain,” ujar AKP Saadun.

Selain itu, AKP Saadun juga mengajak para pelajar untuk bijak dalam bermedia sosial. Ia mengingatkan agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya (hoaks), tidak melakukan perundungan (bullying) daring, serta menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya.

“Media sosial bisa menjadi ruang yang positif kalau digunakan dengan bijak. Jangan sampai kalian menjadi korban atau pelaku dari penyalahgunaan media sosial,” pesannya.

Kapolsek Sukodono berharap edukasi ini dapat membentuk karakter pelajar yang disiplin, sadar hukum, serta cerdas digital sejak dini. Ia juga mengajak pihak sekolah dan orang tua untuk bersama-sama mengawasi dan membimbing anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa dan guru, serta menjadi bagian dari upaya Polsek Sukodono dalam mendukung pembinaan generasi muda yang berintegritas dan berwawasan hukum. (md/rus)



DITINDAK: Petugas Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar Operasi Patuh Semeru 2025 di Bundaran Taman Pinang Indah, Sidoarjo.

Hari Kedua Operasi Patuh Semeru, Puluhan Motor Ditilang di Bundaran TPI

Puluhan pengendara motor yang masih melanggar diberhentikan petugas Satlantas Polresta Sidoarjo untuk ditilang. Kegiatan ini dalam rangka Operasi Patuh Semeru 2025 yang digelar di Bundaran Taman Pinang Indah (TPI) Sidoarjo, Selasa (15/7) sore.

Diky Putra Sansiri, Wartawan Radar Sidoarjo

PULUHAN pengendara motor ditindak tegas karena melanggar aturan. Ironisnya,

masih ada yang nekat menerobos hadangan petugas, saat diberhentikan.

Sore kemarin, dilaksanakan hunting sistem kepada pelanggaran kasat mata. Hasilnya, sebanyak 50 kendaraan ditilang, mayoritas pelanggaran adalah pengendara roda dua.

Jenis pelanggarannya pun beragam, mulai dari tak memakai helm, berboncengan lebih dari dua orang, tak menggunakan spion, hingga pelat nomor kendaraan yang sudah mati.

Kanit Turjawali Satlantas Polresta

Sidoarjo, AKP Ali Rifqi Mubarak menegaskan, Operasi Patuh Semeru digelar untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran pengendara dalam berlalu lintas. Ia menyebutkan, penindakan dilakukan secara humanis, namun tetap tegas.

"Pada Operasi Patuh ini kita melaksanakan giat represif sebesar 50 persen. Penindakan kita laksanakan dengan ETLE statis, ETLE mobile, dan tilang manual," ujarnya ke Radar Sidoarjo, Rabu (16/7).

Tak hanya itu, pihaknya juga menerapkan sistem hunting, yakni petugas

● Ke Halaman 10

Sering Terdampak Banjir, SDN Banjarasri Sepi Peminat

TANGGULANGIN-Sejumlah sekolah negeri di wilayah Tanggulangin mengalami krisis siswa baru. Kondisi tersebut terjadi lantaran sekolah kerap terdampak banjir saat musim hujan.

Salah satunya terjadi di SDN Banjarasri. Tahun ajaran 2025 ini, sekolah tersebut hanya menerima delapan siswa baru.

Padahal, idealnya sekolah bisa menampung hingga 24 siswa. Jumlah itu jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang masih mencapai sepuluh siswa.

Kepala SDN Banjarasri Sulis Indawati mengatakan, banjir menjadi penyebab utama sekolah ditinggalkan calon murid. Menurutnya, genangan air kerap masuk ruang kelas

saat hujan deras turun.

"Ya mau bagaimana lagi, mungkin karena kondisi sekolah kita kerap kebanjiran tiap musim hujan," ucapnya, Rabu (16/7).

Jika banjir parah, siswa terpaksa belajar dari rumah. Hal itu membuat banyak wali murid memilih sekolah lain yang lebih aman dari banjir.

"Banyak dari orang tua siswa yang lebih memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta yang memang tidak terkena banjir," ujarnya.

Meskipun fasilitasnya terbatas, sekolah swasta dianggap lebih layak karena tidak tergenang banjir. Sehingga para siswa tidak akan terganggu oleh masalah tahunan itu.

● Ke Halaman 10



MOMEN: Siswa SDN Banjarasri Tanggulangin harus rela masuk dengan kondisi sekolah banjir.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Susun Panduan Pengembangan Wisata hingga 2045

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tengah menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPAR-DA) untuk periode 2025–2045. Dokumen ini disiapkan sebagai pedoman strategis jangka panjang guna mewujudkan pembangunan sektor pariwisata yang terarah, komprehensif, dan berkelanjutan.

Paparan awal RIPAR-DA disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pada Senin (14/7) di Ruang Rapat Delta Wicaksana, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan



KOORDINASI: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (tengah) dalam rapat koordinasi lintas sektor.

tan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Ketua Komisi D, perwakilan perangkat daerah, serta kalangan akademisi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, dalam arahannya menekankan bahwa pengembangan pariwisata daerah harus

tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga menggali dan mengoptimalkan potensi lokal.

“Integrasi lintas sektor untuk memperkuat po-

tensi wisata edukasi, budaya, dan kesehatan juga sangat penting,” ujarnya.

Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Sidoarjo, Vira Murti Krida Laksmi, menjelaskan bahwa penyusunan RIPAR-DA ini diselenggarakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mencakup beragam tema pengembangan, mulai dari wisata urban, religi, industri, hingga ekonomi kreatif.

“Strategi yang diterapkan juga mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, seperti Banyuwangi, yang berhasil menyinergikan seluruh perangkat daerah dalam satu visi kepariwisataan,” ucapnya.

● Ke Halaman 10





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ribuan Warga Menerima BSU, Total Rp 111 Miliar

KOTA-Sebanyak 145 ribu lebih warga Sidoarjo akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Penyaluran dilakukan melalui Kantor Pos Sidoarjo dan transfer ke rekening bank milik negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan, BSU diberikan kepada warga yang memiliki upah di bawah Rp 3,5

juta. Bantuan yang diterima masing-masing sebesar Rp 600 ribu.

Penyerahan simbolis dilakukan kepada kader kesehatan Posyandu. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 111 miliar. "Secara simbolis, kami serahkan hari ini (Rabu) kepada kader kesehatan Posyandu," ucapnya Rabu, (16/7).

Fenny menjelaskan, pencairan BSU dilakukan

dengan dua mekanisme. Sebagian penerima akan menerima melalui bank negara, sisanya dicairkan melalui Kantor Pos.

Untuk penyaluran lewat Kantor Pos, jumlah penerima mencapai 77.988 orang. Dana yang disalurkan melalui mekanisme ini mencapai Rp 46,7 miliar. "Sementara untuk sisanya akan ditransfer langsung

● Ke Halaman 10



BANTUAN: Warga Sidoarjo saat mengambil BSU dari pemerintah di Kantor Pos.



U-17 Menang Derby, Lolos 32 Besar Piala Soeratin

KOTA-Deltras Sidoarjo U-17 memenangi laga penentuan melawan Persida U-17 dalam lanjutan Grup J Piala Soeratin U-17 Kapal Api Asprov PSSI Jatim 2025. Bermain di Stadion Jenggolo, Selasa (15/7), The Young Lobster unggul tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan dicetak Muhammad Andika Putra Pratama lewat sundulan di menit ke-69. Dia menyambut umpan tarik dari Aqil Agustian Pratama yang menyisir sisi kanan.

Dukungan penuh supporter menjadi suntikan semangat bagi skuad asuhan Rendi Irwan. Mereka akhirnya finis sebagai juara grup dengan torehan sembilan poin dari empat laga.

Kemenangan tersebut membawa Deltras U-17 lolos ke babak 32 Besar bersama Akor FC Jombang U-17. Akor FC menang 3-1 atas Arek Simo Putra U-17 di laga terakhir grup.

Akor FC juga mengoleksi sembilan poin, namun kalah head to head dari Del-



LOLOS: Pemain Deltras Sidoarjo U-17 saat merayakan kemenangan.

tras. Sebelumnya, mereka takluk 0-1 saat jumpa Deltras di laga kedua.

Persida U-17 yang hanya butuh hasil imbang justru tampil antiklimaks. Padahal di dua laga awal, mereka selalu menang telak 4-0 atas Arek Simo Putra U-17 dan Suryanaga

Connection U-17.

Dengan hasil ini, Deltras dan Akor FC melaju ke fase gugur. Sementara Persida, Arek Simo Putra dan Suryanaga Connection harus tersingkir.

Grup J sendiri dihuni lima tim dalam format penyisihan yang mema-

kai sistem setengah kompetisi.

Piala Soeratin U-17 Jatim 2025 diikuti 70 tim dari berbagai daerah. Juara dan runner up grup melaju ke babak 32 Besar, yang akan berlangsung dengan sistem gugur hingga final. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hari Kedua Operasi...

melakukan penindakan di lokasi lokasi rawan pelanggaran tanpa harus membuat pos razia secara stasioner. "Penindakan tidak kita laksanakan secara stasioner, akan tetapi anggota kami yang patroli keliling melaksanakan hunting sistem di titik-titik rawan pelanggaran untuk menemukan pengendara yang melanggar lalu lintas,

terutama lawan arus, tidak pakai helm, pengendara di bawah umur. Untuk pelanggar, kita tindak tilang manual," tambahnya. AKP Ali menyampaikan, pelanggaran yang ditemukan mayoritas sangat membahayakan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak perlu takut saat ada operasi, namun tetap patuh aturan.

"Kami tetap melaksanakan secara humanis. Kalau ada kegiatan kita, masyarakat tidak usah takut. Kalau memang melanggar, kita tindak dengan tilang, nanti tinggal membayar denda di Kejaksaan. Tidak usah takut dengan polisi," ucapnya. Menurutnya, kedisiplinan dalam berkendara harus dibangun bersama, tidak hanya saat dilaksanakan operasi, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. "Operasi Patuh Semeru ini tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat. Kecelakaan itu berawal dari

pelanggaran, jadi patuhilah aturan lalu lintas," imbuhnya. Adapun delapan sasaran prioritas dalam Operasi Patuh Semeru 2025, yaitu, pengendara berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi yang melebihi batas kecepatan, pengendara kendaraan bermotor di bawah umur, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar (SNL), pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi dalam pengaruh alcohol

dan berkendara melawan arus. Salah satu pengendara yang dihentikan, Dzaky, kedapatan tidak mempunyai SIM. Saat dihentikan, ia masih mengenakan seragam sekolah. "Saya tidak punya SIM karena belum mengurus. Ini habis pulang les, bawa motor sendiri karena tidak ada yang ngantar," ujarnya. Pengendara lain, Huda, ditilang karena pelat nomor kendaraannya sudah mati. Ia pun mengakui kesalahannya dan menerima sanksi dari petugas dengan lapang dada. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Susun Panduan Pengembangan...

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa dokumen RIPARDA harus menjadi panduan kerja nyata, bukan sekadar dokumen administratif.

Ia mendorong seluruh pihak agar berkomitmen mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal dan tidak sekadar meniru model dari daerah lain

yang belum tentu sesuai dengan karakter Sidoarjo.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch. Dhamroni Chudlori, menyoroti pentingnya penguatan promosi dan percepatan realisasi program pariwisata di lapangan.

Ia juga menekankan perlunya dukungan terhadap infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi kelembagaan dalam

implementasi kebijakan pariwisata.

Melalui penyusunan RIPARDA ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap dapat memiliki pedoman yang visioner dan aplikatif dalam pengembangan sektor pariwisata.

Dengan demikian, Sidoarjo diharapkan mampu tumbuh menjadi destinasi unggulan yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan hingga tahun 2045. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ribuan Warga Menerima...

ke rekening penerima, proses pencairan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Penjadwalan dilakukan agar proses

berjalan tertib dan tidak menimbulkan kerumunan. Pemerintah ingin memastikan penyaluran berlangsung aman dan lancar.

Fenny berharap bantuan tersebut bisa digunakan secara bijak. Terutama

untuk mendukung ketahanan ekonomi dan kebutuhan pokok keluarga.

“Jangan untuk konsumsi yang tidak penting, saya ingin dana itu bisa dimanfaatkan untuk usaha agar tetap berputar,” pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sering Terdampak Banjir,...

Pihaknya sudah berupaya melakukan pendekatan ke warga sekitar. Bahkan, sempat menawarkan hadiah bagi pendaftar baru.

Namun, usaha tersebut tak mampu menandingi kekhawatiran orang tua soal banjir. Mereka lebih memilih menghindari risiko itu.

Saat ini, pemerintah dikabarkan akan melakukan penanganan di area sekolah. Salah satunya dengan meninggikan akses jalan dan lingkungan sekolah.

Meski begitu, rencana itu masih belum jelas kapan akan direalisasikan. "Informasinya mau ditinggikan oleh pemerintah, namun kapan pelaksanaannya saya belum tahu," katanya.

Hingga kini, proses belajar tetap berlangsung meski jumlah siswa sedikit. Guru tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada siswa yang ada.

"Delapan itu bukan angka kecil, melainkan amanah besar untuk tetap bertahan di tengah genangan harapan," pungkasnya. (sai/vga)





Ketua KONI Sidoarjo memberikan torehan prestasi atlet ketika berkunjung ke Unitomo.

Atlet Berprestasi Dapat Beasiswa dari KONI

Sidoarjo, Memorandum

KONI Sidoarjo berencana memberikan beasiswa untuk atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah di kancah regional, nasional maupun internasional.

Untuk merealisasikan rencana pemberian beasiswa itu, pengurus KONI Sidoarjo berkunjung ke Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Kunjungan itu bertujuan untuk melakukan peninjauan kerja sama beasiswa.

Dipimpin Ketua Umum KONI Sidoarjo Imam Mukri Affandi, rombongan disambut Rektor Unitomo Prof Dr Siti Marwiyah didampingi Wakil Rektor 1, 2 dan 3 di Ruang Proklamasi Unitomo, Selasa (15/7). Imam Mukri Affandi mengatakan, rencana pemberian beasiswa jadi bentuk penghargaan kepada atlet. "Selain itu untuk menjaga motivasi atlet Sidoarjo agar terus berprestasi," katanya.

Ia berharap langkah seperti ini dapat juga menjadi semangat atlet untuk meningkatkan prestasi olahraga. "Ini menjadi salah satu langkah inovatif dan visioner dari KONI Sidoarjo karena kami melihat prestasi olahraga yang berhasil ditunjukkan atlet Sidoarjo pasti ada masanya," ujarnya.

Imam Mukri mengatakan dukungan finansial lewat pemberian beasiswa sangatlah penting bagi masa depan atlet. Mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya. Oleh karenanya KONI Sidoarjo akan berupaya mewujudkan akses pendidikan dengan biaya yang ringan kepada mereka.

"Bidang data KONI Sidoarjo akan kami perintahkan untuk segera menginventarisir data-data atlet yang berprestasi selama ini. Termasuk saat mengikuti Porprov Jatim IX 2025 kemarin," ujarnya.

Rektor Unitomo Surabaya Prof Dr Siti Marwiyah menyambut baik langkah ini. "Ini langkah yang sangat bagus, semoga rencana ini akan segera direalisasikan bersama. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi para atlet," katanya. (sud/san/epe)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

POJOK DAERAH

Susun Strategi Porprov Jatim 2027, KONI Sidoarjo Undang Monev dan Cabor

Sidoarjo, Bhirawa

KONI Sidoarjo akan mengundang Tim Monev Pemenangan Porprov IX Jatim 2025. Upaya ini dilakukan untuk evaluasi agar bisa meraih prestasi di Porprov Jatim X 2027 yang rencananya digelar di Surabaya. "Ini sebagai tindak lanjut setelah KONI Sidoarjo melakukan hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo," komentar Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, Senin (14/7) kemarin. KONI Sidoarjo, kata Imam, juga akan secepatnya mengundang para Ketua Pengkab cabor di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil catatan tim Monev maupun masukan dari para Pengkab Cabor di Sidoarjo, kata Imam, nantinya akan dipakai sebagai bahan evaluasi, bagi KONI Sidoarjo untuk membuat langkah lebih baik dan menyusun strategi, dalam menghadapi Porprov Jatim X tahun 2027 di Kota Surabaya.

Imam Mukri tetap memberi semangat kepada para atlet, pelatih dan official cabor di Kabupaten Sidoarjo, meski gagal menjadi runner up, karena masih ada kesempatan memperbaiki prestasi pada Porprov X tahun 2027 di Kota Surabaya. "Tetap semangat dan saya tetap bangga dan mengapresiasi yang setinggi tingginya kepada atlet pelatih official wali atlet pengurus pengkab cabor yang telah berjuang sangat luar biasa," kata Imam. [kus.wwn]

HARIAN
Bhirawa
Media Rakyat Sidoarjo



BM/ST

KUNJUNGAN KERJA: Kepala BNNK Sidoarjo, Kombes. Pol Gatot Soegeng Soesanto, S.H., melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Pondok Pesantren (YPP) Al Kholiqi, yang dikenal sebagai pusat rehabilitasi pecandu narkoba di Desa Kedungrejo, Waru, Sidoarjo, Selasa (15/7).

Kepala BNNK Tinjau Rehabilitasi Al Kholiqi, Sinergi Kuat Pulihkan Korban Narkoba

SIDOARJO (BM) - Dalam langkah memperkuat sinergi penanganan penyalahgunaan narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto, S.H., melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Pondok Pesantren (YPP) Al Kholiqi, yang dikenal sebagai pusat rehabilitasi pecandu narkoba di Desa Kedungrejo, Waru, Sidoarjo, Selasa (15/7).

Turut mendampingi, Konselor Adiktif Ahli Muda Ahmad Muklis dan tim dari BNNK Sidoarjo meninjau langsung fasilitas fisik, ruang konseling, hingga catatan medis para klien. Kunjungan ini bertujuan memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan BNN. "Kami ingin memastikan bahwa rehabilitasi yang dilakukan mitra kami memenuhi standar, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas tenaga pendamping," ujar Kombes Pol

Gatot.

Ia menekankan bahwa rehabilitasi tak sekadar menyembuhkan fisik, namun juga membangun kembali mental dan spiritual para korban. Ketersediaan konselor, tenaga medis, dan lingkungan yang mendukung sangat berperan dalam proses pemulihan.

Apresiasi pun diberikan kepada pihak yayasan atas dedikasi mereka. "Kami melihat komitmen yang kuat dari YPP Al Kholiqi dalam mendukung program pemerintah. Ini bukti bahwa kolaborasi bisa menjadi kekuatan besar dalam memerangi narkoba," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kombes Pol Gatot mengingatkan bahwa ancaman narkoba di wilayah Sidoarjo masih tinggi, sehingga kewaspadaan dan peran aktif semua elemen masyarakat menjadi sangat penting. "Tidak ada wilayah yang benar-benar steril dari ancaman narkoba. Maka dari itu, gerakan

bersama adalah kunci," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan Sidoarjo Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.

Sementara itu, pimpinan YPP Al Kholiqi, H. Abdul Kholiq, menyambut baik kunjungan BNNK dan mengaku terharu atas perhatian yang diberikan. Ia menegaskan bahwa yayasan yang dipimpinnya menjalankan misi kemanusiaan dan keagamaan dalam proses rehabilitasi. "Ini bukan sekadar program, tapi bentuk ibadah dan pengabdian sosial. Kami berkomitmen mendampingi para klien dengan hati," tegasnya.

Dengan kunjungan ini, diharapkan kemitraan antara BNNK Sidoarjo dan YPP Al Kholiqi terus berkembang, serta memperkuat semangat kolektif dalam menghadapi perang melawan narkoba. (udi)

Cegah DBD, NasDem Gelar Fogging dan Bagikan Sembako di Krian

SIDOARJO (BM) - Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sidoarjo bersama NasDem Muda menggelar aksi sosial berupa penyemprotan (fogging) dan pembagian paket sembako di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (15/7).

Kegiatan ini difokuskan di sejumlah titik rawan, salah satunya Desa Sidorejo, yang diketahui memiliki potensi tinggi dalam penyebaran nyamuk *Aedes aegypti*, vektor penyebab DBD. Kehadiran kader NasDem di lokasi disambut hangat oleh masyarakat yang merasa terbantu atas langkah cepat dan konkret tersebut.

Ketua NasDem Muda Sidoarjo, Tri Dedik Rahmawan, menjelaskan bahwa kegiatan fogging ini merupakan bagian dari komitmen NasDem dalam merespons langsung persoalan

kesehatan di tengah masyarakat. "Ada laporan dari warga terkait adanya warga yang sakit DBD, langsung kami (Nasdem Muda, red) bersama jajaran Pengurus DPD Nasdem Sidoarjo langsung melakukan penyemprotan Fogging di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian ini," Katanya.

"Selain itu kami juga gelar baksos dengan membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan," sambung Dedik, Selasa (15/7/2025).

Menurut Dedik, fogging dilakukan secara bertahap di RT dan RW yang telah dipetakan sebagai kawasan endemis. "Kami juga mengajak warga untuk bergotong-royong untuk membersihkan lingkungan sekitar, menutup tempat penampungan air, dan membuang barang bekas yang bisa menjadi sarang jentik nyamuk," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo, Tania me-

nambahkan jika bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial partai terhadap isu kesehatan masyarakat.

"Kami menyadari bahwa penyebaran DBD kerap meningkat di musim hujan dan pancaroba. Karena itu, fogging menjadi langkah awal pencegahan yang penting. Namun lebih dari itu, kami juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat melalui gerakan 3M Plus: menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas," terang Tania.

Direktur PT Termida, perusahaan yang bergerak di bidang pengendalian hama ini menambahkan jika selain fogging, Partai NasDem dan NasDem Muda Sidoarjo juga membagikan puluhan paket sembako kepada warga Desa Sidorejo yang membutuhkan. "Kami juga membagi Paket sembako bagi warga yang membutuhkan. Partai NasDem akan selalu hadir dimasyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Ke depan, DPD NasDem Sidoarjo berencana memperluas kegiatan serupa di kecamatan-kecamatan lain yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyebaran DBD.

"Kami bersama Nasdem Muda akan terus mensosialisasikan dan Edukasi langsung kepada masyarakat tentang pola hidup sehat juga akan digencarkan di tingkat RT dan RW di Kota Delta. Kami ingin terus hadir dengan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat," pungkas Tania.

Salah satu warga setempat, Paito, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif sosial tersebut. Ia mengatakan bahwa wilayahnya memang cukup sering mengalami kasus DBD saat musim pancaroba.

"Ada beberapa warga yang sudah terjangkit DBD tahun ini. Dengan adanya fogging dari NasDem, kami merasa terbantu. Apalagi masih ditambah bantuan sembako, ini sangat meringankan beban warga," pungkasnya. (udi)



BM/ST

AKSI SOSIAL: Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sidoarjo bersama NasDem Muda menggelar aksi sosial berupa penyemprotan (fogging) dan pembagian paket sembako di Kecamatan Krian Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Mayoritas Fraksi Tolak Pengesahan Raperda



Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Mayoritas Fraksi Tolak Pengesahan Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16/07/2025). Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo dan dihadiri oleh 47 anggota dewan, memenuhi syarat kuorum sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2016 yang telah diperbarui pada 2024.



Agenda yang menjadi bagian penting dalam siklus penganggaran daerah ini berlangsung dinamis dan penuh perdebatan tajam. Dari tujuh fraksi yang menyampaikan pendapat, hanya satu fraksi yang menyatakan persetujuan penuh terhadap Raperda untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), sementara lima fraksi menolak dan satu fraksi mengalami perpecahan internal.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi satu-satunya fraksi yang mendukung penuh pengesahan Raperda. Ketua Fraksi PKB, Dhamroni Chudlori, menyebut Tahun Anggaran 2024 sebagai “tahun emas” bagi kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati H. Subandi.

“Fraksi kami menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Ini adalah tahun emas bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Dhamroni dalam penyampaian pendapat akhir.

Namun, dukungan PKB tersebut tidak diikuti oleh mayoritas fraksi lainnya. Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Tarkit Erdianto, mengkritik tajam peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp600 miliar, naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Silpa tahun ini meningkat 10 persen dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp513 miliar,” ujar Tarkit.

Nada penolakan yang sama datang dari Fraksi Partai Gerindra. Anang Siswandoko, juru bicara fraksi, menyoroti ketidaksesuaian berbagai program dengan RPJMD 2021–2026 serta menyebut adanya indikasi manipulasi dalam target pendapatan dan belanja daerah.

“Ada indikasi permainan dalam target pendapatan, belanja, hingga piutang pajak yang tidak realistis. Program Kurma, persoalan banjir, dan jalan rusak juga belum menunjukkan hasil nyata,” katanya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Fraksi Golkar melalui Adil Kananta juga menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan infrastruktur.

“Di lapangan, jalan rusak dan banjir masih menjadi pemandangan umum,” singkat Adil.

Senada dengan itu, Fraksi PAN melalui Roky Wardoyo menyoroti masih banyaknya sekolah yang rusak meskipun serapan anggaran tergolong tinggi.

Fraksi gabungan PKS–PPP pun menyatakan penolakan. Afdal Muhammad Ikhsan menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD dinilai tidak optimal dan banyak program tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem mengalami perpecahan pandangan. Demokrat menyatakan menerima pertanggungjawaban APBD, sementara NasDem melalui juru bicaranya Aditya Nindyawan menyampaikan penolakan.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, dalam penutupan rapat menegaskan bahwa pelaksanaan paripurna telah sah secara hukum dengan jumlah kehadiran yang memenuhi kuorum.

“Kami minta agar penyampaian Pendapat Akhir fraksi disesuaikan dengan perolehan kursi masing-masing secara berurutan,” ujarnya.

Hasil akhir dari rapat paripurna ini akan menjadi landasan bagi keputusan berikutnya terkait pengesahan Raperda menjadi Perda, yang diperkirakan akan kembali menjadi sorotan dalam agenda DPRD mendatang. (Gus)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ini Alasan Lima Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo menolak Raperda APBD Tahun 2024



SIDOARJO, [SOROTMATA.COM](https://sorotmata.com) | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama Gedung DPRD pada Selasa (16/7/2025). Rapat ini dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, jajaran Forkopimda, rapat tersebut diikuti sebanyak 47 anggota DPRD Sidoarjo. Berdasarkan absen yang diterima sekretariat.

Ada lima fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Setiap fraksi menolak melalui juru bicaranya dalam bentuk Pandangan Akhir (PAK) Fraksi-Fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Penolakan dari Fraksi PKB, Juru bicara Fraksi PKB, M Dhamroni Chudlari yang juga tercatat sebagai Ketua Fraksi PKB menyatakan menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang disahkan menjadi Perda itu. Penerimaan itu dengan dasar dan alasan PKB merupakan satu-satunya partai pengusung dan pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2021 – 2024.



“Menurutnya banyak program yang dilaksanakan sesuai dengan target sekaligus sesuai visi dan misi, maka sebagai partai pengusung, Fraksi PKB menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024,” ujar M Dhamron.

Sedangkan dari Fraksi PDI Perjuangan. Untuk PA Fraksi PDI Perjuangan dibacakan langsung Tarkit Erdianto yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Partai banteng moncong putih ini, menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dengan memberikan sejumlah catatan untuk perbaikan.



“Terdapat beberapa poin catatan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Beberapa poin itu, diantaranya Indeks kualitas hidup turun, jalan rusak dan banjir menunjukkan design tidak jelas dan tidak ada blue print untuk menangani dua persoalan tahunan itu.

“Masih ada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) menunjukkan pemerintahan bersih tidak terlaksana. Ini menunjukkan semangat membentuk pemerintahan yang bersih hanya isapan jempol saja,” tambahnya.

Disusul Partai Gerindra, yang dibacakan Anang Siswandoko sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra langsung menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 untuk disahkan menjadi Perda. Hal ini lantaran banyaknya program visi dan misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan APBD 2024 melalui kebijakan di lapangan banyak yang tidak relevan (sesuai) dengan RPJMD Tahun 2021 sampai 2026.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Diantaranya indikasinya adanya permainan target pendapatan belanja dan piutang pajak yang masih tinggi. Kemudian soal program Kurma dan masalah tahunan banjir dan jalan rusak. Begitu juga soal Silpa justru ada kenaikan dari Tahun 2023 sebelumnya,” ungkap Anang.

Fraksi Golkar juga menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Melihat program banjir dan jalan rusak masih dalam rencana dan wacana saja. Akan tetapi tidak pernah ada bukti nyata dalam penyelesaiannya,” ungkap Adil Jubir Partai Golkar.

Dalam menyampaikan rapat tersebut, Fraksi PAN itu langsung menyatakan menolak Raperda itu.

“Kami melihat masih banyak sekolah yang rusak. Padahal penyerapan APBD 2024 cukup tinggi,” cetusnya.

Afdal Muhammad Ikhsan selaku Juru bicara Fraksi PKS PPP koalisi dua partai ini juga menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dengan berbagai catatan secara terinci.

Terakhir Fraksi Demokrat – Nasdem terbelah menjadi dua. Untuk Partai Demokrat menerima dan Partai Nasdem melalui Aditya Nindyawan justru sebagai juru bicara tidak menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

H. Abdillah Nasih selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan, karena dalam paripurna ini dihadiri 47 orang anggota maka sesuai pasal 1 ayat 1 Tatib DPRD No 1 Tahun 2016 diubah Tatib 2024 tentang Tatib DPRD Sidoarjo memenuhi kuorum.

“Kami minta penyampaian PA Fraksi-Fraksi disesuaikan dengan perolehan kursi secara berurutan,” pungkasnya. (Nuri)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Gelar Paripurna APBD 2024, Mayoritas Fraksi Tolak Pertanggungjawaban



SIDOARJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna, Rabu (16/07/2025), dihadiri oleh 47 anggota dewan dan dinyatakan memenuhi kuorum.



Rapat berjalan dinamis dengan perbedaan pandangan tajam antar fraksi. Dari tujuh fraksi yang menyampaikan sikap, hanya satu fraksi yang sepenuhnya menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Lima fraksi tegas menolak, sementara satu fraksi mengalami perpecahan internal.



Ketua Fraksi PKB, Dhamroni Chudlori, menyebut tahun anggaran 2024 sebagai momentum emas bagi kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati H. Subandi. Menurutnya, PKB sebagai satu-satunya partai pengusung tetap konsisten mendukung penuh pelaksanaan APBD.

"Fraksi kami menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Ini adalah tahun emas bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati," ujarnya dalam forum.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Namun, mayoritas fraksi justru menolak, disertai kritik tajam terhadap pelaksanaan APBD 2024. Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya, Tarkit Erdianto, menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp600 miliar atau sekitar 12 persen dari total APBD.

"Silpa tahun ini meningkat 10 persen dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp513 miliar," ungkap Tarkit.

Penolakan keras juga datang dari Fraksi Partai Gerindra. Juru bicara mereka, Anang Siswandoko, menolak Raperda dan menuding banyak program bupati tak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

"Ada indikasi permainan dalam target pendapatan, belanja, hingga piutang pajak yang tidak realistis. Program Kurma, persoalan banjir, dan jalan rusak juga belum menunjukkan hasil nyata. Silpa justru naik," tegasnya.

Fraksi Golkar, melalui Adil Kananta, memperkuat kritik tersebut dengan menyebut program penanganan banjir dan infrastruktur jalan masih sebatas rencana tanpa realisasi.

"Di lapangan, jalan rusak dan banjir masih menjadi pemandangan umum," singkatnya.

Fraksi PAN juga menyuarakan hal senada. Lewat Roky Wardoyo, fraksi ini menyoroti meskipun serapan anggaran tinggi, banyak sekolah tetap dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki.

Fraksi gabungan PKS–PPP pun menolak pengesahan Raperda. Juru bicara Afdal Muhammad Ikhsan menyampaikan berbagai catatan teknis dan substansial atas pelaksanaan APBD yang dianggap belum optimal dan tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem mengalami perpecahan suara. Demokrat menyatakan menerima pertanggungjawaban APBD, namun Partai NasDem melalui juru bicaranya, Aditya Nindyawan, menyatakan penolakan.



Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa dengan kehadiran 47 anggota, rapat telah sah dan memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2016 yang telah disempurnakan pada 2024.

"Kami minta agar penyampaian Pendapat Akhir fraksi disesuaikan dengan perolehan kursi masing-masing secara berurutan," tegas Abdillah menutup paripurna.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo di Warnai Penolakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.



Rabu (16/7/2025) Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo diwarnai penolakan mayoritas fraksi. Foto: Dok

SIDOARJO||KABARZINDO.com-Rabu (16/7/2025) Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo diwarnai penolakan mayoritas fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Lima fraksi menolak raperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Rapat di ruang paripurna DPRD ini dihadiri 47 anggota dewan, memenuhi kuorum sesuai Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2016 yang telah disempurnakan pada 2024.

Pandangan Akhir (PA) Fraksi dimulai oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Fraksi PKB, H. Moch. Dhamroni Chudlori, menyatakan pihaknya menerima raperda. Ia beralasan sebagian besar program sudah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, mengingat PKB adalah satu-satunya partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati periode 2021–2024.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menerima, namun dengan kritik tajam. Ketua Fraksi, H. Tarkit Erdianto, menyoroti penurunan indeks kualitas hidup, maraknya jalan rusak dan banjir tanpa blueprint penanganan, serta lemahnya upaya pemberantasan korupsi yang terbukti dengan masih terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT).



Gelombang Penolakan: Gerindra, Golkar, PAN, PKS-PPP Kompak Tolak
Penolakan dimulai dari Fraksi Partai Gerindra, disampaikan oleh juru bicara H. Anang Siswandoko. Ia menilai banyak program pemerintah tidak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Gerindra juga menyoroti dugaan manipulasi target pendapatan, tingginya piutang pajak, kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), serta masalah jalan rusak dan banjir yang belum teratasi.

Serupa, Fraksi Partai Golkar juga menolak. Melalui juru bicara Adil Kananta, fraksi ini menilai program penanggulangan banjir dan perbaikan jalan hanya sebatas rencana, tanpa realisasi nyata.

Fraksi PAN, dibacakan Roky Wardoyo, juga menyatakan penolakan. Alasannya, masih banyaknya fasilitas pendidikan—terutama sekolah—yang rusak, meskipun serapan anggaran terbilang tinggi.

Fraksi gabungan PKS–PPP, diwakili H. Afdal Muhammad Ikhsan, menyampaikan penolakan mereka. Catatannya menyoroti ketidakefektifan penggunaan anggaran dan lemahnya kinerja pengawasan program prioritas.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat–Nasdem terpecah. Partai Demokrat menerima raperda tersebut, namun Partai Nasdem menolak. Penolakan disampaikan Aditya, yang menyatakan pelaksanaan APBD 2024 belum mencerminkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, memastikan rapat paripurna sah karena dihadiri 47 anggota dewan. Ia juga meminta penyampaian pandangan akhir fraksi disesuaikan dengan urutan perolehan kursi masing-masing di DPRD.

Dengan dominasi fraksi penolak, nasib Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 kini menjadi sorotan publik. Jika kesepakatan lanjutan tidak tercapai, pemerintah daerah dimungkinkan menggunakan jalur Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai mekanisme alternatif, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan daerah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rapat Paripurna LPJ APBD Sidoarjo 2024: 5 Fraksi DPRD Sidoarjo Menolak, 2 Menerima



Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori saat membacakan pendapat akhir tentang LPJ APBD Sidoarjo 2024.
(FOTO: Syaiful Bahri/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APBD Sidoarjo 2024 ditolak oleh **DPRD Sidoarjo** dalam rapat paripurna yang dihadiri 47 anggota dewan.

Keputusan menolak terhadap LPJ APBD Sidoarjo 2024 setelah 5 dari 7 fraksi dalam pendapat akhir (PA) menolak atau tidak menyetujui.

Fraksi PKB dan PDIP DPRD Sidoarjo menerima. Sedangkan Fraksi Gerindra, PAN-PPP, PKS secara tegas menolak. Fraksi Gabungan Demokrat-NasDem memiliki dua pandangan. Partai Demokrat menerima LPJ APBD dan Nasdem menolak.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menegaskan menerima LPJ APBD 2024 karena masih menganggap laporan tersebut merupakan era pemerintahan Sidoarjo Mas (Ahmad Muhdlor-Subandi).



"PKB Sidoarjo sebagai satu-satunya partai pengusung pasangan Sidoarjo Mas, sudah seyogyanya menerima dan menyetujui Raperda LPJ APBD 2024 ini," ucap Dhamroni saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKB dalam rapat paripurna, Rabu (16/7/2025).

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Tarkit Erdianto menyatakan menerima dan menyetujui LPJ APBD 2024 dengan sejumlah catatan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data keuangan LKPD dengan laporan keuangan yang dapat diakses melalui BPKAD

Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo melalui juru bicara Anang Siswandoko menyampaikan penolakan atas Raperda LPJ APBD 2024. Gerindra merupakan pendukung utama Paslon Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam Pilkada kemarin.

"Ada dugaan permainan dalam penetapan target, termasuk rendahnya keseriusan dalam optimalisasi capaian pajak," ujarnya.

Juru bicara Fraksi Golkar Adiel Muhammad Kanantha yang notabene pengusung Subandi-Mimik juga menolak LPJ APBD 2024.

Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan penting, seperti belum teratasinya persoalan banjir dan munculnya titik-titik banjir baru akibat sistem drainase yang belum diperbarui dengan baik.

Yang cukup menarik adalah pendapat akhir Fraksi NasDem-Demokrat yang memiliki dua pendapat berbeda terkait LPJ APBD 2024. Fraksi Demokrat menyatakan menerima.

Juru bicara Fraksi NasDem, Aditya menolak dengan disertai sejumlah catatan kritis, salah satunya kurang efektifnya Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Pada tahun 2024. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp642,78 miliar.

"Tingginya SiLPA mengindikasikan adanya gap antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan (perencanaan yang belum efektif)," pungkasnya (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kinerja Tak Realistis, Mayoritas Fraksi DPRD Sidoarjo Tolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024



Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak lima fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (16/07/2025) sore. Penolakan itu, disampaikan setiap fraksi melalui juru bicaranya dalam bentuk Pandangan Akhir (PAK) Fraksi-Fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Dalam gelaran rapat paripurna yang digelar di ruang paripurna itu, diikuti sebanyak 47 anggota DPRD Sidoarjo. Berdasarkan absen yang diterima sekretariat maka pelaksanaan rapat paripurna itu dilaksanakan dengan quorum.

PA Fraksi - Fraksi itu diawali dari Fraksi PKB. Juru Bicara Fraksi PKB, M Dhamroni Chudlari yang juga tercatat sebagai Ketua Fraksi PKB menyatakan menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang disahkan menjadi Perda itu. Penerimaan itu dengan dasar dan alasan PKB merupakan satu-satunya partai pengusung dan pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2021 - 2024.

"Karena banyak program yang dilaksanakan sesuai dengan target sekaligus sesuai visi dan misi, maka sebagai partai pengusung tunggal, Fraksi PKB menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024," ujar M Dhamroni Chudlari saat membacakan PA Fraksi PKB, Rabu (16/07/2025).





Selanjutnya rapat paripurna dilanjutkan dengan PA Fraksi PDI Perjuangan. Untuk PA Fraksi PDI Perjuangan dibacakan langsung Tarkit Erdianto yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Partai banteng moncong putih ini, menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dengan memberikan sejumlah catatan untuk perbaikan.

"Terdapat beberapa poin catatan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Beberapa poin itu, diantaranya Indeks kualitas hidup turun, jalan rusak dan banjir menunjukkan design tidak jelas dan tidak ada blue print untuk menangani dua persoalan tahunan itu. Kemudian juga masih ada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) menunjukkan pemerintahan bersih tidak terlaksana. Ini menunjukkan semangat membentuk pemerintahan yang bersih hanya isapan jempol saja," paparnya.

Kemudian pembacaan PA Fraksi-Fraksi dilanjutkan PA Fraksi Partai Gerindra. Dalam pembacaan Fraksi Partai Gerindra suasana langsung riuh. Hal ini lantaran pembukaan PA Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Anang Siswandoko sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra langsung menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 untuk disahkan menjadi Perda. Hal ini lantaran banyaknya program visi dan misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan APBD 2024 melalui kebijakan di lapangan banyak yang tidak relevan (sesuai) dengan RPJMD Tahun 2021 sampai 2026.

"Diantaranya indikasinya adanya permainan target pendapatan belanja dan piutang pajak yang masih tinggi. Kemudian soal program Kurma dan masalah tahunan banjir dan jalan rusak. Begitu juga soal Silpa justru ada kenaikan dari Tahun 2023 sebelumnya," tegas Anang yang juga mantan kontraktor Sidoarjo ini.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Sedangkan PA Fraksi Golkar juga menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Hal ini karena melihat program banjir dan jalan rusak masih dalam rencana dan wacana saja. Akan tetapi tidak pernah ada bukti nyata dalam penyelesaiannya.

"Di lapangan masih banyak jalan rusak dan banjir terjadi dimana-mana," ucap Jubir Partai Golkar Adil Kananta.

Sementara Fraksi PAN dibacakan Roky Wardoyo. Dalam membacakan PA Fraksi itu langsung menyatakan menolak Raperda itu.

"Kami melihat masih banyak sekolah yang rusak. Padahal penyerapan APBD 2024 cukup tinggi," tandasnya.

Untuk Fraksi PKS PPP dibacakan Afdal Muhammad Ikhsan selaku Juri Bicara. Fraksi koalisi dua partai ini juga menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dengan berbagai catatan secara terinci.





Sedangkan terakhir PA Fraksi Demokrat – Nasdem terbelah menjadi dua. Untuk Partai Demokrat menerima dan Partai Nasdem melalui Aditya Nindyanawan justru sebagai juru bicara tidak menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan karena dalam paripurna ini dihadiri 47 orang anggota maka sesuai pasal 1 ayat 1 Tatib DPRD No 1 Tahun 2016 diubah Tatib 2024 tentang Tatib DPRD Sidoarjo memenuhi quorum.

"Kami minta penyampaian PA Fraksi-Fraksi disesuaikan dengan perolehan kursi secara berurutan," pungkasnya. Hel/Waw

Kinerja Pemda Disorot, DPRD Sidoarjo Tolak Laporan APBD 2024



Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo

Filesatu.co.id, SIDOARJO | RAPAT Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rabu sore (16/07/2025) diwarnai **penolakan mayoritas fraksi** terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. **Lima fraksi menolak** raperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Rapat di ruang paripurna DPRD ini **dihadiri 47 anggota dewan**, memenuhi **kuorum** sesuai Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2016 yang telah disempurnakan pada 2024.

Perpecahan di Tengah Dewan: Menerima dengan Kritik, Menolak dengan Alasan Kuat

Pandangan Akhir (PA) Fraksi dimulai oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Fraksi PKB, H. Moch. Dhamroni Chudlori, menyatakan pihaknya menerima raperda. Ia beralasan sebagian besar program sudah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, mengingat PKB adalah satu-satunya partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati periode 2021–2024.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menerima, namun dengan kritik tajam. Ketua Fraksi, H. Tarkit Erdianto, menyoroti penurunan indeks kualitas hidup, maraknya jalan rusak dan banjir tanpa *blueprint* penanganan, serta lemahnya upaya pemberantasan korupsi yang terbukti dengan masih terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Gelombang Penolakan: Gerindra, Golkar, PAN, PKS-PPP Kompak Tolak

Penolakan dimulai dari Fraksi Partai Gerindra, disampaikan oleh juru bicara H. Anang Siswandoko. Ia menilai banyak program pemerintah tidak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Gerindra juga menyoroti dugaan manipulasi target pendapatan, tingginya piutang pajak, kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), serta masalah jalan rusak dan banjir yang belum teratasi.

Serupa, Fraksi Partai Golkar juga menolak. Melalui juru bicara Adil Kananta, fraksi ini menilai program penanggulangan banjir dan perbaikan jalan hanya sebatas rencana, tanpa realisasi nyata.

Fraksi PAN, dibacakan Roky Wardoyo, juga menyatakan penolakan. Alasannya, masih banyaknya fasilitas pendidikan—terutama sekolah—yang rusak, meskipun serapan anggaran terbilang tinggi.

Fraksi gabungan PKS–PPP, diwakili H. Afdal Muhammad Ikhsan, menyampaikan penolakan mereka. Catatannya menyoroti ketidakefektifan penggunaan anggaran dan lemahnya kinerja pengawasan program prioritas.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat–Nasdem terpecah. Partai Demokrat menerima raperda tersebut, namun Partai Nasdem menolak. Penolakan disampaikan Aditya, yang menyatakan pelaksanaan APBD 2024 belum mencerminkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih.

Keputusan DPRD Sidoarjo dan Implikasi ke Depan

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, memastikan rapat paripurna sah karena dihadiri 47 anggota dewan. Ia juga meminta penyampaian pandangan akhir fraksi disesuaikan dengan urutan perolehan kursi masing-masing di DPRD.

Dengan dominasi fraksi penolak, nasib Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 kini menjadi sorotan publik. Jika kesepakatan lanjutan tidak tercapai, pemerintah daerah dimungkinkan menggunakan jalur Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai mekanisme alternatif, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan daerah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo : Rokok ilegal Sangat Merugikan Masyarakat dan Negara



Sidoarjo (aksaraindonesia.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo prihatin dengan tingginya penjualan rokok ilegal di Sidoarjo. Berdasarkan data penindakan rokok ilegal pada wilayah kerja Bea Cukai Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto) menunjukkan tren kenaikan adanya perdagangan rokok ilegal. Hingga Juni 2025, Bea Cukai Sidoarjo berhasil menyita 17.720.452 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 14,1 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Warih Andono mengatakan mengkonsumsi rokok itu memang ada dampak negatifnya di sisi kesehatan namun dampak tersebut bisa meningkatkan berkali-kali lipat jika mengkonsumsi rokok ilegal.

“Sebab rokok ilegal tidak diketahui apakah komposisi bahan-bahan yang digunakan pas, apakah kualitas bahan-bahan yang digunakan memenuhi syarat atau tidak. Karena ilegal dan murah harganya maka sangat berpotensi bahwa kualitas bahan yang digunakan tidak bagus. Hal itu tentu akan sangat mempengaruhi kesehatan baik si perokok aktif maupun non aktif,” papar Warih pada Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 di Balai Desa Tropodo, Selasa (15/07/2025).

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara saja tetap juga masyarakat. Sebab pajak dari cukai rokok itu dikembalikan ke masyarakat.

“Dari Cukai tersebut until Bantuan Langsung Tunai (BLT) Cukai bagi petani tembakau, untuk kesehatan bagi mereka yang menderita batuk karena rokok. Jadi ayo ikut gempur rokok ilegal karena yang dirugikan adalah panjenengan semua,” tegas Warih.

Sebelumnya, Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, Deny Haryanto menjelaskan bahwa dengan maraknya masyarakat yang memilih rokok ilegal justru mengganggu perekonomian.

“Ada rokok ilegal itu sangat mengganggu perekonomian makro atau pendapatan Kabupaten Sidoarjo dari cukai rokok,” ungkap Politisi dari Partai Keadilan Sosial (PKS) ini.

Ketua PKS Kabupaten Sidoarjo ini menjelaskan DPRD Kabupaten Sidoarjo sangat ingin memfasilitasi pengusaha rokok atau UMKM rokok agar tidak menjadi produsen rokok ilegal lagi. Tujuan Pemkab Sidoarjo dalam gerakan gempur rokok ilegal adalah ingin melindungi warga Sidoarjo baik dari sisi kesehatan bagi perokok aktif dan pasif serta dari kasus hukum bagi produsennya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Jangan memaknai kegiatan ini sebagai pengawasan yang menakutkan tetapi mari memaknai sebagai wujud cinta pemerintah akan keamanan dan kesehatan masyarakat nya.

Ini akan terus digaungkan ke pelosok pelosok desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo, ” paparnya.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Tropodo, Moch Kusaini mengungkapkan penduduk Tropodo sangat banyak dan penduduk Tropodo banyak yg menjual dan mengkonsumsi rokok ilegal.

“Banyak yang jualan rokok ilegal di Tropodo ini baik warga Tropodo sendiri maupun dari luar Tropodo. Kami berharap jangan sampai pedagang ini terjerat kasus hukum karena menjual rokok ilegal, ” pungkasnya. Sis





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lima Fraksi Menolak Raperda LPP APBD Sidoarjo 2024





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo (aksaraindonesia.id) – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo ramai dengan aksi menolak Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2024. Dari tujuh (7) fraksi, ada lima Fraksi yang menolak Raperda LPP Tahun 2024 yang dinilai kurang tepat sasaran dan bahkan merugikan masyarakat Sidoarjo.

Dua Fraksi yang menerima Raperda LPP Tahun Anggaran 2024 adalah Fraksi PKB dan PDIP, sedangkan Fraksi Gerindra, PAN-PPP, PKS secara tegas menolak. Fraksi Gabungan Demokrat-NasDem memiliki dua pandangan. Partai Demokrat menerima Raperda LPP APBD dan Nasdem menolak.

Pembacaan pendapat akhir Fraksi yang pertama dari Fraksi PKB. Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menegaskan sebagai pengusung pasangan Ahmad Mudhlor – Subandi tentunya pihaknya mendukung dan menerima Raperda LPP APBD 2024.

“PKB Sidoarjo sebagai satu-satunya partai pengusung pasangan Sidoarjo Mas, sudah seyogyanya menerima dan menyetujui Raperda LPP APBD Tahun 2024 ini,” ucap Dhamroni pada Sidang Paripurna V dengan agenda Penyampaian pendapat akhir Fraksi -Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16/7/2025).

Penerimaan atas Raperda LPP APBD 2024 juga dinyatakan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Juri bicara Fraksi PDIP, Tarkit Erdianto menyatakan beberapa point yang harus diperhatikan secara serius dan dilakukan perbaikan pada Tahun 2025 ini.

“Kami juga menemukan ketidaksesuaian data keuangan LKPJ dengan laporan keuangan yang dapat diakses melalui BPKAD, ” sebut Tarkit.

Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko menyampaikan Fraksi Gerindra menolak atas Raperda LPP APBD 2024. Gerindra merupakan pendukung utama Paslon Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam Pilkada kemarin.



“Ada dugaan permainan dalam penetapan target, termasuk rendahnya keseriusan dalam optimalisasi capaian pajak,” ujarnya.

Penolakan juga diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Golkar Adiel Muhammad Kanantha yang notabene pengusung Subandi-Mimik juga menolak Raperda LPP APBD 2024.

Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan penting, seperti belum teratasinya persoalan banjir dan munculnya titik-titik banjir baru akibat sistem drainase yang belum diperbarui dengan baik.

Bila Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar dengan tegas menolak, berbeda dengan Fraksi NasDem-Demokrat yang memiliki dua pendapat berbeda terkait Raperda LPP APBD 2024. Dimana, Fraksi Demokrat menyatakan menerima sedang Fraksi NasDem menolak.

Juru bicara Fraksi NasDem, Aditya menolak dengan disertai sejumlah catatan kritis, salah satunya kurang efektifnya Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Pada tahun 2024. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp642,78 miliar.

“Tingginya SiLPA mengindikasikan adanya gap antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan (perencanaan yang belum efektif),” pungkasnya. Sis





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Wonoayu: Ir. Supriyono Tegaskan Sampah adalah Tanggung Jawab Bersama



Sidoarjo | MMCNEWS , 16 Juli 2025 — Pemerintah Kecamatan Wonoayu bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi pengelolaan sampah di ruang rapat Kantor Kecamatan Wonoayu. Kegiatan ini dibuka oleh Plt Camat Wonoayu, Drs. Anwar, dan menghadirkan Ir. Supriyono, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, sebagai narasumber. Turut hadir pula perwakilan dari DLHK, Budi Santoso, serta para perwakilan desa se-Kecamatan Wonoayu.

Dalam sambutannya, Drs. Anwar menyampaikan pentingnya kesadaran bersama dalam pengelolaan sampah. Ia menekankan bahwa meskipun di Kecamatan Wonoayu telah terdapat beberapa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), namun pelaksanaannya belum maksimal.

"Kami berharap ke depan setiap desa semakin sadar dan peduli terhadap pengelolaan sampah. Kami tengah mencari desa yang siap menyediakan lahan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah. Insyaallah, pemerintah daerah akan mendukung pembangunannya," terang Anwar.

Hal senada disampaikan oleh Ir. Supriyono dari Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab semua pihak, dari lapisan terbawah hingga pimpinan daerah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

7 Partai Koalisi Sidoarjo Maju Tolak Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024

SIDOARJO (liputansidoarjo.com) –

Pasca penolakan mayoritas fraksi DPRD Sidoarjo atas Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024, Pergerakan politik di kota Delta bergerak cepat dan dinamis.



Bahkan untuk memperkuat sikap penolakan itu, tujuh partai besar pemilik kursi parlemen Sidoarjo, menggelar jumpa pers menyatakan sikap bersama, Rabu (16/7/2025).

Tidak tanggung-tanggung, Ke tujuh partai besar yang berkumpul di kantor DPD Partai Golkar ini adalah PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, Partai Nasdem dan PPP.

Tidak terlihat pengurus PKB maupun Partai Demokrat dalam jumpa pers ini.

Adam Rusdy ketua DPD Partai Golkar yang menjadi juri bicara konferensi pers menyatakan, banyak sekali indikasi dan fakta yang menjadikan dasar untuk menolak Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Liputan Sidoarjo.com

"Seperti banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah Sidoarjo, jalan jalan yang masih banyak yang rusak dan berbagai fakta di lapangan," ujar Adam.

Yang menarik dalam koalisi Sidoarjo maju ini, adalah kehadiran PDIP yang pada paripurna sebelumnya menerima pelaksanaan APBD 2024 meskipun dengan catatan yang cukup keras.

Tarkit Erdianto ketua fraksi PDIP DPRD Sidoarjo yang hadir dalam jumpa pers, menyatakan bahwa perubahan sikap PDIP ini merupakan dinamika per detik dari kondisi politik di Sidoarjo.

Sebagai kader partai, tentu saja sikap penolakan yang hanya jeda sekian jam ini, merupakan sikap tegak lurus akan instruksi partai.

"Instruksi partai harus kita jalankan dengan tegak lurus, dengan dinamika yang terjadi, maka kita nyatakan menolak Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2024," ungkap Tarkit Erdianto.

Koalisi yang terbilang kuat secara politik di Sidoarjo ini menurut Adam Rusdy, bisa jadi merupakan koalisi permanen dengan satu tujuan membangun Kabupaten Sidoarjo lebih baik. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Salurkan BSU, Sekda Kab.Sidoarjo : Manfaatkan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga

© Heri Margo 16 Juli 2025 0



SIDOARJO | Suaralintasindonesia.com -Sebanyak 155 ribu lebih warga Sidoarjo akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan, BSU diberikan kepada warga yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan yang diterima masing-masing sebesar Rp 600 ribu.

"Penyaluran BSU ini dilakukan menjadi 2 mekanisme yaitu melalui Kantor Pos Sidoarjo dan transfer ke rekening bank Himbara (himpunan bank milik negara)," katanya saat menghadiri acara simbolis penyerahan BSU di Kantor Pos Sidoarjo, Rabu (16/7).

Dikatakannya, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 111 miliar, dengan rincian yang disalurkan oleh Kantor Pos Sidoarjo adalah sebesar Rp 46,7 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 77.988 orang dan sisanya melalui bank Himbara. "Hari ini, secara simbolis, kami serahkan kepada kader kesehatan Posyandu yang tidak memiliki rekening himbara," ucapnya.

Fenny berharap bantuan tersebut bisa digunakan secara bijak. Terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi dan kebutuhan pokok keluarga.

"Saya harap agar penerima BSU menggunakan uangnya bukan hanya untuk konsumtif yang habis di makan begitu saja, namun dapat dimanfaatkan untuk support ketahanan pangan keluarga seperti kelompok Asman Toga (Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga) dengan membuat kripik atau makanan yang bernilai jual sehingga uang Rp 600 ribu tetap berputar," harapnya.

Sementara itu, Heny apriningsih (61 tahun) salah satu kader Kelurahan Sidoklumpuk, Sidoarjo mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya BSU ini, pihaknya juga selama ini aktif dalam memanfaatkan uangnya untuk ketahanan pangan dikeluarganya.

"Nantinya saya juga akan investasikan bantuan ini ke tanaman Toga atau untuk kebutuhan keluarga yang lebih bermanfaat untuk keberlangsungan hidup," jelasnya. (Hr)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Ini Pernyataan Sikap 7 Partai Koalisi Sidoarjo Maju



Jawapes, SIDOARJO – Tujuh partai 'Koalisi Sidoarjo Maju' diantaranya Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Nasdem, PPP dan PDIP menyatakan sikapnya terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna ke-V pada Rabu (16/7/2025).

Secara bersama, ke 7 partai Koalisi Sidoarjo Maju menggelar konferensi pers di aula partai Golkar Jl. A. Yani Sidoarjo pada Rabu (16/7/2025) sore, dimana Adam Rusydi (Golkar) ditunjuk sebagai pembicara mewakili anggota partai lain yang hadir, diantaranya Suyarno, Warih Andono, Kayan, Emir Firdaus, Bangun Winarso, Adiel Muhammad Kanantha, Achmad Muzayin Syafrial, Rizal Faudy, Deny Haryanto, Aditya Indra Putra Mualin, Bambang Pujiyanto, Muhammad Dian Felani, Prabata Ferdiansyah, Muhammad Zakaria Dimas Pratama, Tarkit Erdianto dan Pratama Yudhiarto.

Disampaikan Adam bahwa dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat, Koalisi Sidoarjo Maju memandang bahwa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 memuat sejumlah capaian yang patut dihargai, namun belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

Lanjut Adam, ditengah dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, kami menilai masih terdapat ruang pembenahan yang cukup lebar, baik dalam aspek perencanaan program, penyerapan anggaran, maupun capaian kinerja lintas sektor.



Oleh karena itu, Koalisi Sidoarjo Maju menyampaikan beberapa catatan strategis dan masukan sebagai bentuk tanggung jawab politik kami dalam menjaga arah pembangunan daerah agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kebutuhan riil masyarakat :

1. Koalisi Sidoarjo Maju mencermati bahwa program penanggulangan banjir masih berada dalam tataran rencana dan wacana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin, sedati, dan Porong selalu menjadi "pelanggan tetap" genangan dan banjir musiman. Bahkan saat ini, muncul titik-titik banjir baru yang sebelumnya tidak pernah terdampak, seperti beberapa desa di Kecamatan Krian, Tulangan, Prambon dan Tarik. Ini mencerminkan bahwa sistem drainase tidak diperbarui sesuai perkembangan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

Koalisi Sidoarjo Maju menekankan bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda pembangunan infrastruktur pengendali banjir, baik berupa kolam retensi, saluran primer-sekunder, maupun pompa otomatis, karena kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar dari biaya konstruksi yang dibutuhkan.

Dampak dari ketidakjelasan penanganan banjir di Sidoarjo tampak nyata, salah satunya di SDN Banjarasri Tanggulangin yang terdampak langsung oleh banjir. Akibat kondisi tersebut, minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah ini menurun drastis, terbukti dari hanya 10 siswa baru yang mendaftar pada tahun ajaran ini. Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo selalu menjadi korban dampak dari akibat banjir yang setiap tahun selalu terjadi, kami menilai pemerintah kabupaten Sidoarjo tidak serius dalam menangani permasalahan penanggulangan Banjir.

2. Koalisi Sidoarjo Maju menilai program prioritas Bupati yang mencanangkan penciptaan "100.000 lapangan kerja" tidak disertai indikator yang jelas dan terukur. Tidak ada penjelasan berapa banyak lapangan kerja yang benar-benar diciptakan sepanjang tahun 2024, dari sektor mana saja, dan melalui skema apa. Apakah melalui investasi, padat karya, BLK, UMKM, atau program lainnya? Tanpa indikator kinerja yang konkret dan akuntabel, maka program ini hanya akan menjadi jargon politik tanpa bukti nyata. Tidak hanya itu, masalah lapangan kerja diperparah dengan hanya 34,6 persen pekerja Sidoarjo yang terlindungi program jaminan sosial, selebihnya tidak memiliki jaminan sosial/ BPJS.

Koalisi Sidoarjo Maju menuntut ke depan, setiap program prioritas harus disertai tolok ukur keberhasilan yang terpublikasi secara berkala kepada masyarakat. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka diangka 6,49 persen, yang merupakan angka TPT tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Hal ini berbanding terbalik dengan angka indeks pembangunan manusia terbuka di kabupaten Sidoarjo sebesar 82,67 persen, yang justru dikhawatirkan oleh Koalisi Sidoarjo Maju nantinya akan semakin banyak pengangguran Intelektual, yang akan membawa dampak negative bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

3. Koalisi Sidoarjo Maju memberikan perhatian serius terhadap masih maraknya pungutan di sekolah negeri, khususnya SD dan SMP, dengan dalih "kesepakatan komite". Selain itu, Koalisi Sidoarjo Maju juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang masih memprihatinkan. Banyak sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, serta sarana belajar yang tidak memadai.

Namun, upaya perbaikan terkendala oleh alokasi anggaran pendidikan yang sangat minim. Anggaran pendidikan hampir semua terserap untuk belanja rutin, sehingga anggaran untuk sarana pra-sarana sekolah menjadi sangat terbatas.

Koalisi Sidoarjo Maju menegaskan bahwa pendidikan dasar adalah hak rakyat dan wajib difasilitasi oleh negara tanpa biaya. Kabupaten Sidoarjo memiliki alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar, yakni lebih dari 20 persen APBD, yang seharusnya mampu membiayai operasional sekolah tanpa membebani orang tua siswa. Koalisi Sidoarjo Maju meminta agar penggunaan anggaran pendidikan difokuskan pada kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan murid dan sekolah.

4. Berdasarkan hasil ikhtisar BPK RI, terdapat temuan oleh BPK RI yang dilakukan Uji Petik kepada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, yang melakukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kelalaian dari Pimpinan Daerah. Koalisi Sidoarjo Maju melihat bahwa problem ini bukan sekadar teknis administratif, tetapi mencerminkan kultur birokrasi yang belum profesional dan akuntabel.

Oleh karena itu, Koalisi Sidoarjo Maju menuntut agar segera mengevaluasi pejabat terkait dan meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.

5. Koalisi Sidoarjo Maju memandang bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo masih jauh dari harapan publik. Di tengah geliat ekonomi dan pertumbuhan kawasan industri, justru masih ditemukan ratusan titik jalan yang rusak parah, berlubang, dan tak layak dilintasi.

Data dari Dinas PU Bina Marga mencatat lebih dari 445 titik kerusakan jalan yang tersebar di berbagai kecamatan hingga pertengahan 2025. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas warga dan logistik usaha kecil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Betul, beberapa perbaikan memang telah dilakukan menjelang Lebaran 2025 dan ada program betonisasi di sejumlah ruas utama. Namun, Koalisi Sidoarjo Maju menilai langkah ini masih bersifat tambal-sulam dan reaktif. Tanpa desain infrastruktur jangka panjang dan perencanaan drainase yang terpadu, kerusakan akan terus berulang. Di banyak wilayah seperti Kureksari dan Kemangsari, jalan rusak disebabkan bukan karena volume kendaraan saja, melainkan gagalnya sistem drainase yang tak pernah dibenahi bersamaan.

6. Lebih dari itu, Koalisi Sidoarjo Maju melihat adanya masalah dalam sisi tata kelola anggaran dan pengawasan. Anggaran jalan setiap tahun dikururkan dalam jumlah besar, namun hasilnya tidak mencerminkan perbaikan signifikan. Di sinilah letak kerapuhan manajemen proyek infrastruktur di Sidoarjo. Indikasi lemahnya pengawasan teknis, pelaksanaan proyek yang asal jadi, hingga ketidakterbukaan kepada publik terhadap pelaksanaan proyek perlu mendapat perhatian serius.

Koalisi Sidoarjo Maju menilai bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 belum merepresentasikan capaian kinerja yang progresif, terukur, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Masih tampak lemahnya konsistensi dalam perencanaan hingga pengawasan program, yang mengindikasikan belum hadirnya komitmen politik (political will) yang kuat dari pimpinan daerah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Manfaatkan Untuk Ketahanan Pangan, Sekda Kab. Sidoarjo Salurkan BSU,



SIDOARJO, [SOROTMATA.COM](https://sorotmata.com) | Sebanyak 155 ribu lebih warga Sidoarjo akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan, BSU diberikan kepada warga yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan yang diterima masing-masing sebesar Rp 600 ribu.

“Penyaluran BSU ini dilakukan menjadi 2 mekanisme yaitu melalui Kantor Pos Sidoarjo dan transfer ke rekening bank Himbara (himpunan bank milik negara),” katanya saat menghadiri acara simbolis penyerahan BSU di Kantor Pos Sidoarjo pada Rabu (16/7/2025).

Dikatakannya, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 111 miliar, dengan rincian yang disalurkan oleh Kantor Pos Sidoarjo adalah sebesar Rp 46,7 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 77.988 orang dan sisanya melalui bank Himbara.



“Hari ini, secara simbolis, kami serahkan kepada kader kesehatan Posyandu yang tidak memiliki rekening himbara,” ucapnya.

Fenny berharap bantuan tersebut bisa digunakan secara bijak. Terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi dan kebutuhan pokok keluarga.

“Saya harap agar penerima BSU menggunakan uangnya bukan hanya untuk konsumtif yang habis di makan begitu saja, namun dapat dimanfaatkan untuk support ketahanan pangan keluarga seperti kelompok Asman Toga (Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga) dengan membuat kripik atau makanan yang bernilai jual sehingga uang Rp 600 ribu tetap berputar,” harapnya.

Sementara itu, Heny apriningsih (61 tahun) salah satu kader Kelurahan Sidoklumpuk, Sidoarjo mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya BSU ini, pihaknya juga selama ini aktif dalam memanfaatkan uangnya untuk ketahanan pangan dikeluarganya.

“Nantinya saya juga akan investasikan bantuan ini ke tanaman Toga atau untuk kebutuhan keluarga yang lebih bermanfaat untuk keberlangsungan hidup,” jelasnya. (Nuri)



Tujuh Parpol Mengatasnamakan Koalisi Sidoarjo Maju Tolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

16 Juli 2025 - 82 Dilihat

oleh editor sidoarjosatu.com



Foto : Koalisi Sidoarjo Maju menggelar konferensi pers penolakan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Rabu, (16/7/2025).

SIDOARJOSATU.COM — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 resmi ditolak oleh Koalisi Sidoarjo Maju usai Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo,

Koalisi yang terdiri dari tujuh fraksi besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, NasDem, PPP, dan PDI Perjuangan menilai bahwa pelaksanaan APBD 2024 belum menunjukkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

“Kami melihat masih banyak masalah struktural yang belum dibenahi, mulai dari penanganan banjir, penciptaan lapangan kerja, hingga transparansi anggaran. Ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut arah politik anggaran yang tidak berpihak pada rakyat,” tegas juru bicara Koalisi Sidoarjo Maju, Adam Rusydi dalam penyampaian sikap politik mereka di kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo, Rabu, (16/7/2025).

Salah satu sorotan tajam berkaitan dengan penanggulangan banjir yang dinilai masih dalam tataran wacana, bukan aksi nyata. Titik-titik banjir seperti di Waru, Taman, Sedati, Porong, hingga kawasan baru di Krian dan Tarik terus berulang tanpa solusi tuntas.



"Setiap tahun masyarakat menjadi korban. Bahkan, akibat banjir, minat masyarakat mendaftarkan anak ke SDN Banjarasri Tanggulangin merosot drastis. Hanya 10 siswa baru yang mendaftar. Ini bukan hanya bencana alam, tapi cermin kegagalan tata kelola," tegas Adam.

Menurutnya, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dinilai tidak serius dalam penanganan banjir dan hanya bersifat tambal sulam.

"Ada titik-titik banjir baru di wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak. Ini menunjukkan bahwa sistem drainase tidak diperbarui sesuai perkembangan kawasan," tambahnya.

Mereka mendesak pemerintah segera menyusun master plan penanggulangan banjir yang terintegrasi dan mengalokasikan anggaran secara tepat, termasuk pembangunan kolam retensi dan pompa otomatis.

Selain itu, Koalisi Sidoarjo Maju juga menyoroti program prioritas bupati terkait penciptaan 100.000 lapangan kerja, yang disebut tanpa indikator dan capaian jelas. Tidak ada data detail dari sektor mana lapangan kerja diciptakan atau melalui skema apa.

"Angka pengangguran terbuka Sidoarjo masih di 6,49 persen, tertinggi di Jawa Timur. Di sisi lain, IPM kita tinggi, 82,67. Ini mengindikasikan ancaman pengangguran intelektual yang harus segera ditangani secara strategis," terangnya.

Selain itu, pungutan di sekolah negeri dengan dalih 'komite' masih marak. Koalisi mengkritisi bahwa anggaran pendidikan lebih dari 20 persen APBD justru banyak terserap untuk belanja rutin, bukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

"Sekolah rusak, ruang kelas kurang, alat belajar tidak memadai. Ini ironi. Pendidikan dasar adalah hak rakyat, jangan dibebankan ke orang tua," kata Adam Rusydi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lanjutnya, terdapat 27 OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang melakukan kesalahan penganggaran belanja. Koalisi menilai ini sebagai indikasi lemahnya pengawasan internal dan budaya birokrasi yang belum profesional.

"Ini bukan hanya salah input. Ini soal tata kelola dan integritas. Kami minta evaluasi menyeluruh pejabat terkait," ujarnya.

Kondisi infrastruktur jalan juga menjadi kritik keras. Tercatat 445 titik jalan rusak tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari Kureksari hingga Kemangsren. Perbaikan hanya bersifat tambal-sulam dan tidak menyentuh akar masalah seperti sistem drainase.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Anggaran besar tiap tahun dikucurkan, tapi hasilnya jalan tetap rusak. Ini persoalan manajemen proyek dan pengawasan yang lemah. Masyarakat butuh solusi, bukan seremonial perbaikan sebelum lebaran saja,” terangnya.

Atas semua pertimbangan strategis tersebut, Koalisi Sidoarjo Maju secara tegas menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Mereka menilai laporan tersebut belum mencerminkan transparansi, efektivitas, dan keberpihakan pada rakyat.

“Kami tidak ingin sekadar menyetujui formalitas angka. Kami ingin APBD benar-benar menjadi alat perubahan sosial, bukan sekadar alat birokrasi,” tegasnya.

Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sidoarjo, khususnya dalam barisan Koalisi Sidoarjo Maju, akan lebih kritis dan transparan dalam mengawal anggaran publik, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Sementara dalam sesi tanya jawab, wartawan menyoroti dinamika politik yang melatarbelakangi terbentuknya Koalisi Sidoarjo Maju, termasuk perubahan sikap partai besar seperti Golkar dan PDI Perjuangan yang awalnya menerima APBD dengan catatan.

“Reaksi PDI Perjuangan harus menolak. Ini perintah dari langit, dan saya akan tegak lurus,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tarkit Erdianto saat ditanya soal perubahan sikap dari menerima menjadi menolak.

Menurut Tarkit, penolakan itu bukan tanpa sebab, melainkan keinginan partai tentang suatu perubahan yang nyata untuk Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau saya tetap menerima, itu justru saya berdosa. Kami ingin perubahan nyata untuk Sidoarjo,” tandasnya. (Had).





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Salurkan BSU, Sekda Sidoarjo Minta Dimanfaatkan Untuk Usaha Ketahanan Pangan Keluarga



Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak 155.000 lebih warga Sidoarjo bakal menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan BSU diberikan kepada warga yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan yang diterima masing-masing sebesar Rp 600.000.

"Penyaluran BSU ini dilakukan menjadi 2 mekanisme yaitu melalui Kantor Pos Sidoarjo dan transfer ke rekening Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)," ujar Fenny saat menghadiri acara simbolis penyerahan BSU di Kantor Pos Sidoarjo, Rabu (16/07/2025).



Menurut Fenny, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 111 miliar. Rincian yang disalurkan oleh Kantor Pos Sidoarjo sebesar Rp 46,7 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 77.988 orang dan sisanya melalui bank Himbara.

"Hari ini, secara simbolis, kami serahkan kepada kader kesehatan Posyandu yang tidak memiliki rekening Himbara," katanya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Fenny berharap bantuan ini bisa digunakan secara bijak. Terutama, untuk mendukung ketahanan ekonomi dan kebutuhan pokok keluarga.

"Saya harap agar penerima BSU menggunakan uangnya bukan hanya untuk konsumtif yang habis dimakan begitu saja. Tapi harus dapat dimanfaatkan untuk support ketahanan pangan keluarga seperti kelompok Asman Toga (Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga) dengan membuat kripik atau makanan yang bernilai jual. Harapannya, uang Rp 600.000 tetap berputar," pintanya.

Sementara Heny Apriningsih (61) salah satu kader Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya BSU ini. Pihaknya juga selama ini aktif dalam memanfaatkan uangnya untuk ketahanan pangan di keluarganya.



"Nantinya saya juga akan investasikan bantuan ini ke tanaman Toga atau untuk kebutuhan keluarga yang lebih bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kami sekeluarga," pungkasnya. Ary/Waw

